

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Aluisius Heri Purnomo
NIM : 042114032

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010

Skripsi

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

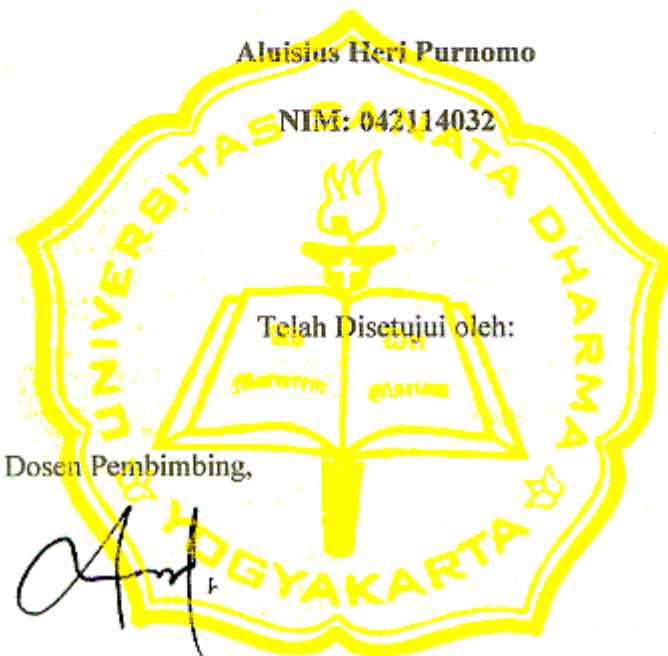
KABUPATEN SLEMAN

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Oleh:

Aluisius Heri Purnomo

NIM: 042114032



Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA

Tanggal, 7 Januari 2010

Skripsi

**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN**

Dipersembahkan dan ditulis oleh:
Aluisius Heri Purnomo
NIM: 042114032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 29 Januari 2010
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., Akt., M.Si., QIA.
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA.
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA.
Anggota	Josephine Wuri, S.E., M.Si.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 30 Januari 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Aluisius Heri Purnomo

Nomor Mahasiswa : 042114032

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain demi kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya ataupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Tanggal 7 Januari 2010

Yang menyatakan



(Aluisius Heri Purnomo)

Berani, tidak takut,
tidak malu, tidak malas, dan
yang paling penting tidak memalukan

Skripsi ini ku persembahkan kepada:
Allah Tri Tunggal Maha Kudus
Bunda Suci Maria
Ayah dan Ibu tercinta
Mas, Mbak, dan Adikku tersayang



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 30 Januari 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 7 Januari 2010

Yang membuat pernyataan,

(Aluisius Heri Purnomo)

ABSTRAK

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Aluisius Heri Purnomo
042114032
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode 2003-2007 ditinjau dengan menggunakan analisis varians. (2) Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode 2003-2007 dengan menggunakan pendekatan tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan, dan desentralisasi fiskal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan analisis varians untuk membandingkan kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Melakukan analisis realisasi APBD Kabupaten Sleman dengan menggunakan pendekatan tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan, dan desentralisasi fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan analisis varians, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan indikasi yang baik. Hal ini mengacu pada hasil analisis varians pada APBD yang menunjukkan adanya realisasi pendapatan daerah yang meningkat dibandingkan dengan anggarannya. Sementara pada aspek belanja daerah, diketahui bahwa nilai realisasi belanja daerah lebih kecil daripada anggarannya. (2) Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan kinerja yang cenderung meningkat, dilihat dari aspek kemampuan kemandirian pembiayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah serta desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang positif pada ketiga variabel tersebut. Namun variabel kemampuan mobilisasi daerah menunjukkan kinerja yang cenderung menurun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang negatif.

ABSTRACT

FINANCIAL PERFORMANCE ASSESSMENT OF SLEMAN REGENCY

A Case Study at Sleman Regency

Aluisius Heri Purnomo
042114032
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2010

This study aimed to: (1) Know the regency's financial performance in period 2003-2007 by using analysis of variance. (2) Measure the financial performance of Sleman regency in the period 2003-2007 using the approach of independency level of financing, the level of dependency, and fiscal decentralization.

The data collection techniques were interview, documentation and observation. The data analysis technique used was by conducting analysis of variance to compare the real performance and the budgeted. One, doing analysis on realization of APBD using the approach of financing, the level of dependency, and fiscal decentralization.

The research results showed that: (1) Based on the analysis of variance, the Sleman regency's financial performance 2003-2007 periods showed a good indication. This referred to the results of analysis variance on the budget which showed increasing realization of revenues compared to the budget. While on the aspects of local expenditure, it was known that the realization of the value of local expenditures was less than budget. (2) the financial performance of Sleman regency in the period 2003-2007 showed that performance tended to increase as seen from the aspect of local financing capabilities, the level of regional dependency, and fiscal decentralization. This was indicated positive regression coefficient on those three variables. But the regional mobilization ability variable indicated performance tending to decrease. This was indicated by the negative regression coefficient.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dari lubuk hati yang paling dalam penulis panjatkan kepada Bunda Maria serta Putra-Nya Yesus Kristus atas segala berkah, karunia, serta kebaikan-Nya, karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman” ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
3. Antonius Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA., selaku dosen pembimbing yang di tengah kesibukannya telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat selesai.
4. Seluruh dosen yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di Universitas Sanata Dharma.
5. Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan kesempatan, bimbingan dan kasih sayangnya pada penulis dari waktu penulis kecil sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

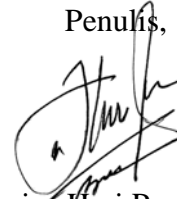
6. Mas Hargi, Mbak Dwi atas semua dukungannya sebagai kakak yang baik, dan adikku Dodo yang sudah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
7. Josephine “Uthe” atas kasih sayang dan dukungannya dalam mendampingi penulis hingga selesainya penelitian ini.
8. Keluarga Besar Mapasadha, *survive* di kota memang lebih berat dari pada *survive* di gunung dan hutan, tapi kalian telah mengajarku dengan baik.
9. Team Fasilitator out bound Silerak Desa Wisata Ngepas : Mas Mulyadi, Jalu, Bayu, Zamroni, Joko, Agus Padek, Dian, Ning, Gunawan, Dodo, Fibri, Dayat, Danang, Ana, Westry, Yayat, Bejo, Yoko, Andi, Komo, Sadiyo, Jumadi, Dayat, Reni, Amat atas kebersamaan kita sebagai keluarga, Semoga yang menjadi mimpi-mimpi kita akan segera terwujud.
10. *Team Youth Center K3AS* atas *character, community, dan spiritual building*-nya. Eksis selalu untuk pendampingan kaum muda kita.
11. Mudika Paroki St.Aloysius Gonzaga Mlati dan mudika wilayah St. Petrus Donoharjo Utara, Sunu, Qendar, Kawil, Kebo, Magna, Ita, Dina, Antok, Riawan, Mas Edi, Ira, Yulek, Joko, Joni, Siska, Arda, Budi, Peyang, dkk, kalian adalah sahabat-sahabat yang baik.
12. Kompas Adventure, Pak Totok, Mas Woko, Mas Tiyong, dkk, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis menerima kritik, koreksi, dan saran dari pembaca yang

mengarah pada kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 7 Januari 2010

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alusius Heri Purnomo', written in a cursive style.

Alusius Heri Purnomo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Anggaran Sektor Publik	6
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7
C. Kinerja	9
D. Indikator Kinerja	11
E. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	13
F. Analisis Varians dan Analisis Tingkat Kemandirian Pembiayaan, Tingkat Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal serta Analisis Trend	14
G. Penelitian Terdahulu	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Tempat dan Waktu Penelitian	21
C. Subyek dan Objek Penelitian	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	26
A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Sleman	26
B. Keadaan Fisik	27
1. Geografi	27

2. Karakteristik Wilayah	30
C. Daya Tarik Kabupaten Sleman	31
1. Kota Pendidikan	31
2. Pariwisata	31
D. Peluang investasi	32
E. Kondisi Ekonomi	33
1. Produk domestic Regional Bruto (PDRB)	33
2. PDRB Perkapita	34
3. Pertumbuhan Ekonomi	34
4. Keuangan Daerah	36
5. Strukur Perekonomian Daerah	36
6. Investasi	36
7. Pertanian	36
F. Kondisi Sosial Budaya	37
1. Kependudukan	37
2. Ketenagakerjaan	37
3. Kesenian dan Kebudayaan	39
4. Agama	39
G. Pemerintahan	40
BAB V PEMBAHASAN	43
A. Analisis Varians Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Periode Tahu 2003-2007	42
1. Analisis Varians APBD Tahun 2003	42
2. Analisis Varians APBD Tahun 2004	44
3. Analisis Varians APBD Tahun 2005	47
4. Analisis Varians APBD Tahun 2006	51
5. Analisis Varians APBD Tahun 2007	53
B. Analisis Varians dan Analisis Tingkat Kemandirian Pembiayaan, Tingkat Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Periode Tahun 2003-2007	57
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
Tabel 5.1 Tingkat Kemampuan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	56
Tabel 5.2 Tingkat Kemampuan Mobilisasi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	58
Tabel 5.3 Tingkat Ketergantungan Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007.....	60
Tabel 5.4 Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	63
Gambar 5.1 Diagram Perkembangan Tingkat Kemampuan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	57
Gambar 5.2 Trend Perkembangan Kemampuan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	58
Gambar 5.3 Diagram Perkembangan Tingkat Kemampuan Mobilisasi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007.....	59
Gambar 5.4 Trend Perkembangan Kemampuan Mobilisasi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	60
Gambar 5.5 Diagram Perkembangan Tingkat Ketergantungan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	61
Gambar 5.6 Trend Perkembangan Tingkat Ketergantungan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	63
Gambar 5.7 Diagram Perkembangan Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	64
Gambar 5.8 Trend Perkembangan Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik yang harus disampaikan secara sistematis dan transparan. Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas harus ditunjukkan para manajer pemerintah daerah dalam laporan keuangan. Seiring dengan perkembangan reformasi dan otonomi daerah, sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah mengalami perubahan. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah dan perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

Sistem desentralisasi ini mencakup berbagai bidang, yaitu: politik, administrasi dan fiskal. Berkaitan dengan desentralisasi fiskal tersebut terdapat tiga pilihan, yaitu: *Pertama*, memberikan seluruh basis pajak kepada daerah kemudian mewajibkannya untuk menyetor sebagian dari hasil pajak tersebut kepada tingkat pemerintah yang lebih tinggi untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. *Kedua*, seluruh kewenangan perpajakan berada pada pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat membiayai pemerintah daerah dengan sistem transfer atau hibah baik melalui bagi hasil seluruh penerimaan atau melalui bagi hasil penerimaan pajak-pajak tertentu. *Ketiga*, memberikan kewenangan pemungutan pajak pada pemerintah daerah,

apabila terjadi ketimpangan vertikal karena pemberian kewenangan ini maka untuk melengkapi eksistensi pajak daerah tersebut diberikan pula bagi hasil atau transfer dari pemerintah pusat.

Untuk mencapai kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuan dari pemberian otonomi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi pemerintah daerah apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang langsung ataupun tidak langsung

mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang terletak di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai daerah yang terletak di lereng gunung Merapi, Sleman merupakan kawasan yang cukup subur. Secara administratif Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa dan 1.212 dusun (Krisna Wahyu, 2006:32). Untuk mendapatkan kepercayaan publik, setiap kepala administratif di Kabupaten Sleman harus melaporkan kinerjanya kepada kepala administratif yang lebih tinggi atau yang berada di atasnya dan kepada masyarakat umum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sleman untuk dapat menilai sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Sleman. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode 2003-2007 diukur dengan menggunakan analisis varians?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode 2003-2007 dilihat dari tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan dan desentralisasi fiskal?

C. Batasan Masalah

Pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan menggunakan analisis varians, tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan dan desentralisasi fiskal terbatas pada periode 2003-2007.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode 2003-2007 dengan menggunakan analisis varians.
2. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode 2003-2007 dengan melihat dari tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan dan desentralisasi fiskal.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma, sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah.
3. Bagi penulis, sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka yang dijadikan dasar untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

Berisi tentang keadaan pemerintah Kabupaten Sleman secara umum meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, pemerintahan, sosial, dan sumber daya alam.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan sesuai dengan metode penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2002:62). Anggaran publik berisi estimasi tentang apa yang akan dilakukan oleh organisasi dimasa yang akan datang. Secara singkat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan (Mardiasmo, 2002:62)

- a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
- b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana pengeluaran tersebut.

2. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002:63) fungsi dari anggaran sektor publik adalah:

- a. Sebagai alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

- c. Sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Sebagai alat politik, anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
- e. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran, oleh karena itu anggaran publik dapat menjadi alat koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam pemerintah.
- f. Sebagai alat penilaian kinerja, kinerja eksekutif dinilai berdasar pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran.
- g. Sebagai alat motivasi, anggaran dapat digunakan untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien.
- h. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, anggaran tidak hanya disusun oleh organisasi pemerintah saja, melainkan masyarakat, LSM, dan berbagai organisasi kemasyarakatan juga harus terlibat dalam penganggaran publik.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, yang menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal dari suatu periode anggaran (Halim, 2002:24).

Berdasarkan struktur anggaran kinerja, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Aparatur Daerah

Belanja aparatur daerah adalah bagian belanja yang berupa: belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

2. Belanja Pelayanan Publik

Belanja pelayanan publik adalah bagian belanja yang berupa: belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah pengeluaran uang oleh pemerintah daerah dengan tidak secara langsung menerima imbal barang dan jasa seperti pembelian dan penjualan, tidak mengharapkan dibayar kembali seperti suatu pinjaman dan tidak mengharapkan hasil pendapatan seperti layaknya kegiatan investasi.

4. Belanja Tidak Disangka

Belanja tidak disangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam dan pengembalian penerimaan yang bukan hak daerah.

APBD merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang telah dimandatkan oleh masyarakat, pemerintah harus melaksanakan dua fungsi yaitu: *pertama*, mengumpulkan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat. *Kedua* penggunaan sumber daya tersebut harus secara representatif, efektif dan efisien.

C. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Indra Bastian (2002:329) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Maksudnya, setiap organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang dalam visi dan misi organisasi.

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan

mekanisme *reward* dan *punishment system* yang digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi (Mardiasmo, 2002:58).

2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002:122) tujuan pengukuran kinerja adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

3. Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002:122) manfaat pengukuran kinerja adalah:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arahan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja kemudian membandingkan dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja yang kurang baik.
- d. Sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* secara objektif sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

D. Indikator Kinerja

1. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai alat untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa indikator dari unit kerja yang bersangkutan hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam upaya menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai keberhasilan program/kegiatan/kebijakan. Dengan indikator kinerja organisasi memiliki wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang (Nugroho, 2003:10).

Menurut Nur Achmad Afandi dalam Nugroho (2003:11) indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*).

2. Fungsi Indikator Kinerja (Nugroho, 2003:12)

- a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan. Kegiatan umumnya berjangka waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan tentang apa yang dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam tahun per tahun.
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan dan dalam menilai kinerja memberikan rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya.
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

3. Syarat-syarat Indikator Kinerja (Nugroho,2003:12)

- a. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kesalahan interpretasi.
- b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, apabila keduanya diukur menggunakan indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
- c. Relevan, artinya bahwa indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
- d. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.

- e. Harus cukup fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
- f. Efektif, informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan dana yang tersedia.

E. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000

Penjelasan umum atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kedua undang-undang tersebut berkeinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.

2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999

Secara khusus UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk kekuasaan sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan Daerah tersebut.
- c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
- d. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

F. Analisis Varians dan Analisis Tingkat Kemandirian Pembiayaan, Tingkat Ketergantungan dan Desentralisasi Fiskal, serta Analisis Trend

1. Analisis Varians

Penilaian laporan kerja finansial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

(Mardiasmo, 2002:123). Analisis varians secara garis besar berfokus pada varians pendapatan dan varians pengeluaran.

Hasil dari analisis varians kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase yaitu: *Realisasi : Anggaran X 100%* . Setelah dilakukan analisis varians, selanjutnya dilakukan identifikasi sumber terjadinya varians dengan menelusur varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen yang paling bawah.

Anggaran pendapatan lebih besar dari pada realisasi, maka selisihnya bersifat menurun dan kinerjanya tidak baik. Sedangkan dalam pengeluaran/belanja jika anggaran lebih besar dari sesungguhnya yang terjadi (aktual), maka selisihnya bersifat menguntungkan dan menunjukkan kinerja yang baik (Krisna Wahyu, 2006:30).

2. Analisis Tingkat Kemandirian Pembiayaan, Tingkat Ketergantungan dan Desentralisasi Fiskal.

Untuk mengukur kinerja keuangan dan kemandirian keuangan pemerintah daerah dapat digunakan tiga pendekatan (Halim, 2002), meliputi: tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan dan desentralisasi fiskal (Arifin, 2005:108).

1. Analisis Tingkat Kemandirian Pembiayaan

Ukuran ini digunakan untuk menguji tingkat kekuatan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai

APBD setiap periode anggaran. Tingkat kemandirian pembiayaan daerah diukur dengan dua buah kriteria yaitu kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah (Arifin, 2005:108). Kemampuan daerah dalam pembiayaan diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Belanja Rutin Non Pegawai (BRNP). Untuk kemampuan mobilisasi daerah ditentukan dengan ukuran rasio Pajak Daerah (PD) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD), atau secara singkat dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan Pembiayaan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai}}$$

$$\text{Kemampuan Mobilisasi Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

2. Tingkat Ketergantungan

Variabel ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Alat analisis yang digunakan adalah derajat otonomi fiskal yang menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Derajat otonomi fiskal diukur dengan mengukur rasio antara PAD terhadap penerimaan APBD tanpa subsidi (Arifin, 2005:109). Secara singkat tingkat ketergantungan dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Penerimaan APBD tanpa Subsidi}}$$

3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu kabupaten/kota – untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini berarti pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional, sehingga seluruh tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah daerah. Tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah. Secara singkat tingkat desentralisasi fiskal dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

3. Analisis Trend

Trend merupakan gerakan yang berjangka panjang, lamban dan berkecenderungan berjalan menuju ke satu arah, arah menaik atau menurun. Dengan kata lain trend merupakan rata-rata perubahan dalam jangka panjang (Subagyo dan Jarwanto, 1996:86). Analisis trend dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad , \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X}$$

Keterangan :

Y' = variabel kinerja keuangan pemerintah daerah

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = waktu (tahun)

G. Penelitian Terdahulu

1. Nugroho (2003) mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman dengan menggunakan analisis varians. Penelitian ini yang pertama bertujuan untuk mengetahui penerapan PP 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri 29/2002 pada pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman. Yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan/perbedaan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan PP 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri 29/2000. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis varians yang digunakan untuk membandingkan selisih/perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam kondisi baik. Hasil analisis varians menunjukkan bahwa jumlah pendapatan mengalami peningkatan secara total dan pada pos belanja ditarik kesimpulan efisien.

2. Nadeak (2003) menganalisis rasio Keuangan APBD untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah, studi kasus pada Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian dan perkembangan rasio efektivitas dan efisiensi pemungutan PAD Kabupaten Maluku Tenggara untuk tahun anggaran 1998/1999-2002. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian masih sangat jauh dari yang diharapkan, rasio efektivitas pemungutan PAD cenderung tidak efektif. Berdasarkan hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa pemungutan PAD sudah efisien.
3. Muryani (2005) menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan analisis keuangan laporan perhitungan APBD, penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, dan rasio pertumbuhan selama tahun 2001-2003. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kemandirian Pemerintah Kabupaten Sleman yang diukur melalui PAD masih jauh dari yang diharapkan. Sedangkan efektivitas dan efisiensi pemungutan PAD sudah efektif dan efisien. Pertumbuhan APBD dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan kecuali dalam komponen belanja operasi dan pemeliharaan.

4. Krisna Wahyu (2006) Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis varians. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan dan analisis varians terhadap APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rasio yang terdiri dari: rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemandirian Pemkot Yogyakarta untuk periode 2002-2003 masih sangat rendah dan menunjukkan pola hubungan instruktif. Analisis rasio efektivitas Pemkot Yogyakarta dalam memungut Pendapatan Asli Daerahnya untuk periode 2002-2003 sudah efektif. Analisis rasio efisiensi Pemkot Yogyakarta dalam pemungutan pajaknya sudah efisien. Dari sisi kemampuan membayar hutangnya tahun anggaran 2003 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2002. Rasio pertumbuhan APBD Pemkot Yogyakarta menunjukkan kinerja pertumbuhan APBD positif meskipun kecenderungannya semakin berkurang. Berdasarkan hasil analisis varians terhadap APBD secara umum menunjukkan kinerja APBD untuk tahun anggaran 2002 dan 2003 sudah efektif baik dan efisien).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sehingga kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 24 April 2009 s/d 24 Juli 2009.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah semua orang yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan yaitu :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sleman.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Sleman.
- c. BPS Kabupaten Sleman

2. Objek Penelitian

1. Neraca Daerah tahun 2003-2007

Neraca daerah merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu periode tertentu.

2. Laporan Arus Kas tahun 2003-2007

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi.

3. Laporan Perhitungan Anggaran tahun 2003-2007

Laporan perhitungan anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi dalam APBD di akhir periode.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dan catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional yang terjadi, dengan harapan peneliti lebih mudah mengetahui kinerja yang terjadi dalam pemerintah daerah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

1. Memaparkan tentang laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk satu periode.
2. Melakukan analisis varians untuk membandingkan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Hasil dari analisis ini kemudian dinyatakan dalam bentuk prosentase yaitu: *Realisasi : Anggaran X 100%* .
3. Menarik kesimpulan dari analisis varians, yaitu:
 - a. Dalam varians pendapatan apabila realisasi lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan atau selisih antara realisasi dengan anggaran adalah positif, maka selisihnya bersifat menguntungkan dan menunjukkan kinerja yang baik. Sebaliknya apabila realisasi lebih kecil dibandingkan dengan yang dianggarkan atau selisih antara realisasi dengan anggaran adalah negatif, maka selisihnya bersifat tidak menguntungkan dan menunjukkan kinerja yang tidak baik. Apabila realisasi sama dengan yang dianggarkan, maka selisihnya sama dengan nol dan dikatakan efektif.
 - b. Dalam varians pengeluaran apabila realisasi lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan atau selisih antara realisasi dengan anggaran adalah positif, maka selisihnya bersifat tidak menguntungkan dan menunjukkan kinerja yang tidak baik. Sebaliknya, apabila realisasi lebih kecil dibandingkan dengan yang dianggarkan atau selisih antara realisasi dengan anggaran adalah negatif, maka selisihnya bersifat menguntungkan dan menunjukkan kinerja yang baik. Apabila realisasi

sama dengan yang dianggarkan, maka selisihnya sama dengan nol dan dikatakan efisien. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Varians (selisih)	%	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6	7

4. Melakukan analisis realisasi APBD Kabupaten Sleman dengan menggunakan 3 jenis pendekatan, yaitu:

a. Tingkat Kemandirian Pembiayaan

Diukur dengan dua buah kriteria, yaitu kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah.

$$\text{Kemampuan Pembiayaan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai}}$$

$$\text{Kemampuan Mobilisasi Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat kecenderungan kemampuan pembiayaan daerah serta mobilisasi daerah selama tahun 2003 - 2007, dengan formula sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = kemampuan pembiayaan daerah/ mobilisasi daerah di tahun t+1

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = waktu (tahun)

b. Tingkat Ketergantungan

Diukur dengan menggunakan derajat otonomi fiskal yang menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli

daerahnya. Derajat otonomi fiskal diukur dengan mengukur rasio antara PAD terhadap penerimaan APBD tanpa subsidi.

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Penerimaan APBD tanpa Subsidi}}$$

Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat kecenderungan tingkat ketergantungan daerah selama tahun 2003-2007. Adapun formula analisis trend adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = tingkat ketergantungan daerah di tahun $t+1$

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = waktu (tahun)

c. Desentralisasi Fiskal

Diukur dengan menggunakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Tingkat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk mengetahui kecenderungan tingkat desentralisasi fiskal selama tahun 2003-2007.

Adapun formula analisis trend adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = tingkat desentralisasi fiskal di tahun $t+1$

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = waktu (tahun)

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Kabupaten Sleman

Berdasarkan Perda No. 12 tahun 1998, tertanggal 19 Oktober 1998 menetapkan tanggal 15 Mei tahun 1916 sebagai hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa tanggal 15 Mei adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman yang sudah ada sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945, sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern yang memunculkan Pemerintah Dati II Sleman.

Penentuan hari jadi Kabupaten Sleman dilakukan melalui penelaahan berbagai materi dari berbagai sumber informasi dan fakta sejarah. Adapun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan adalah usia penanaman yang paling tua. Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menetapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 (dua belas) Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sengkala (perhitungan tahun Masehi) Rasa Manunggal Hanggarata Negara yang memiliki arti Rasa = 6, Manunggal = 1, Hanggarata = 9, Negara = 1, sehingga

terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun 1846.

B. Keadaan Fisik

1. Geografi

a. Letak Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai $107^{\circ}15'03''$ sampai dengan $100^{\circ}29'30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}34'51''$ sampai dengan $7^{\circ}47'03''$ Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km². Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat

35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan).

c. Topografi, Geohidrologi, Klimatologi, dan Tata Guna Tanah

1) Topografi

Keadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar, kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng gunung Merapi relatif terjal. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl).

2) Geohidrologi

Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, di mana endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah.

Di Kabupaten Sleman terdapat sekitar 100 sumber mata air, yang airnya mengalir ke sungai-sungai utama yaitu sungai Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Di samping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di samudera Indonesia. Di Kabupaten Sleman terdapat 4 jalur mata air (*springbelt*) yaitu: jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mata air ini telah banyak dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupun irigasi.

3) Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah dengan curah hujan tinggi. Kondisi agroklimat di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

4) Tata Guna Tanah

Hampir setengah wilayah Kabupaten Sleman merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Proporsi penggunaan lahan meliputi sawah, tegalan, pekarangan, dan lain-lain

2. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan karakteristik sumber daya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

- a. Kawasan Lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan sampai dengan Puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumber daya air dan potensi ekowisata yang berorientasi pada aktivitas gunung Merapi dan ekosistemnya.
- b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, Kalasan, dan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
- c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan dan jasa.
- d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah dan penghasil bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, dan gerabah (Sleman, 2006 Annual Report).

C. Daya Tarik Kabupaten Sleman

1. Kota Pendidikan

Kabupaten Sleman memiliki atmosfer intelektual yang sangat kuat. Pada tahun 2006, di Sleman terdapat 505 Sekolah Dasar dengan 85.088 siswa dan 5.466 guru, terdapat 120 Sekolah Lanjutan Pertama dengan 31.914 siswa dan 3.265 guru, serta 96 Sekolah Lanjutan Atas dengan 27.403 siswa dan 3.416 guru.

Lebih dari 135.000 orang mahasiswa belajar di 5 Perguruan Tinggi Negeri dan 37 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di wilayah Sleman dengan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang lengkap dan modern. Perguruan tinggi di Kabupaten Sleman berorientasi pada pembentukan *intellectual skill*, *communications skill*, dan *interpersonal skill* untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki etos kerja profesional.

Di Sleman tersedia zona dan fasilitas pembangunan kampus yang dapat mendukung proses belajar mengajar seperti *student housing*, auditorium, fasilitas olah raga *indoor/outdoor*, jaringan infrastruktur, dan utilitas.

2. Pariwisata

Daya tarik pariwisata Kabupaten Sleman merupakan perpaduan antara panorama alam yang kuat dengan kebudayaan dan sejarah kepurbakalaan. Wisata alam Kabupaten Sleman terpusat pada

keberadaan gunung Merapi (2.996 m) sebagai sumber inspirasi. Banyak variasi wisata diciptakan di kawasan Lereng Gunung Merapi yang berudara sejuk, seperti lapangan golf, taman rekreasi, panjat tebing, *tracking tour*, *lava tour*, dan sebagainya. Tersedia pula restoran alam, villa, tour wisata alam, wisata pedesaan, dan lain-lain. Obyek wisata yang tersedia meliputi: wisata alam 5 lokasi, wisata budaya 9 lokasi, wisata agro 4 lokasi, wisata desa 30 lokasi, wisata pendidikan 5 lokasi, dan wisata sejarah 11 lokasi.

Selain itu, Merapi mempunyai nilai magis dalam budaya Jawa yang meyakini adanya garis lurus imajiner dari laut selatan menuju Puncak Gunung Merapi yang melewati Kraton Yogyakarta (*The imaginary Line of Jogjakarta*). Akulturasi agama Islam dan Hindu ke dalam budaya Jawa telah melahirkan lebih dari 30 seni tradisional dan 11 macam upacara adat.

Di sisi barat wilayah Sleman terdapat sentra kerajinan dan mebel bambu. Di sisi timur, terdapat 11 obyek wisata purbakala berupa candi, yang terbesar adalah Candi Prambanan. Secara periodik, ketika bulan purnama, di pelataran candi Prambanan digelar pentas sendratari Ramayana.

3. Peluang Investasi

Prospek berinvestasi di Kabupaten sangat baik hampir di semua sektor perekonomian. Lahan pertanian yang subur masih tersedia luas dengan irigasi yang cukup, sangat baik untuk pengembangan usaha

bidang agribisnis, perkebunan, dan perikanan. Lahan yang kurang produktif untuk pertanian juga masih tersedia cukup luas, siap dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan, industri, properti, pendidikan dan lain-lain.

Banyaknya penduduk Sleman yang hampir mencapai satu juta jiwa dengan pendapatan perkapita lebih dari 8,3 juta per tahun, dan lebih dari 47% diantaranya berpendidikan menengah ke atas, merupakan pasar produk sekaligus sumber tenaga kerja terdidik yang potensial. Tersedianya infrastruktur yang cukup akan memudahkan pengadaan bahan baku, barang modal, energi, serta memudahkan pemasaran.

Peluang investasi juga terbuka lebar untuk usaha kerajinan dan industri pengolahan, khususnya untuk pangsa ekspor, usaha di bidang pariwisata, perhotelan, restoran, transportasi, jasa keuangan dan jasa lainnya.

E. Kondisi Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten sleman mengalami kenaikan 11,30% dari Rp 7,67 triliun tahun 2005 menjadi Rp 8,54 triliun tahun 2006. Untuk periode yang sama, PDRB atas harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) meningkat 4,66% dari Rp 5,08 triliun tahun 2005 menjadi Rp 5,32 triliun tahun 2006.

Upaya peningkatan PDRB Kabupaten Sleman terus diupayakan melalui peningkatan produktivitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan infrastruktur perekonomian. Titik-titik dan jenis-jenis usaha sebagai generator pertumbuhan ekonomi terus ditumbuhkan, difasilitasi dan dipelihara, bukan hanya untuk meningkatkan volume melainkan juga kualitas dan kecepatan transaksi kegiatan perekonomian di Kabupaten Sleman.

2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) Penduduk Sleman tahun 2006 sebesar Rp 8,4 juta, naik 8,43% dibandingkan tahun 2005. Sedangkan PDRB perkapita menurut harga konstan (ADHK 2000) pada tahun 2006 sebesar Rp 5,4 juta, mengalami kenaikan 4,80% dibandingkan tahun 2005. Dengan besaran pendapatan perkapita tersebut, diyakini permintaan efektif terhadap produk akan cukup tinggi sehingga mampu menjadi *trigger* pertumbuhan kembali sektor riil, sekaligus membuka peluang peningkatan investasi melalui akumulasi tabungan masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman pada tahun 2006 mencapai 4,66%, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,03% pada tahun 2005. Penyebab utama penurunan tersebut adalah terganggunya kegiatan perekonomian akibat bencana alam gempa bumi

tektonik pada bulan Mei 2006 dan Erupsi Gunung Merapi pada bulan Juni 2006.

4. Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman tahun 2006, memperkirakan besarnya belanja mencapai Rp 716,7 milyar sedangkan besarnya pendapatan mencapai Rp 654,3 milyar sehingga terjadi defisit sebesar Rp 62,4 milyar. Dalam realisasinya, pendapatan daerah mencapai Rp 702,9 milyar yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 90,7 milyar (12,9%) dan Dana Perimbangan sebesar Rp 612,2 milyar (87,1%). Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp 609,8 milyar (21,9%) dan Belanja Pelayanan Publik Rp 476,2 milyar (78,1%). Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran 2006 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp 93,1 milyar (15,3%). Dibandingkan tahun 2005, PAD tahun 2006 meningkat sebesar Rp 12,8 milyar (16,4%), Dana Perimbangan meningkat Rp 169,6 milyar (38,3%), dan Pendapatan Daerah meningkat Rp 182,4 milyar (35,1%).

5. Stuktur Perekonomian Daerah

Empat sektor pendukung utama perekonomian di Kabupaten Sleman pada tahun 2006 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,59%); sektor jasa-jasa (17,62%); sektor pertanian (17,11%); dan sektor industri pengolahan (16,42%). Kontribusi sektor primer menurun

dari 17,85% pada tahun 2005 menjadi 17,47% tahun 2006, kontribusi sektor sekunder meningkat dari 27,45% menjadi 27,63%, dan kontribusi sektor tersier meningkat dari 54,70% menjadi 54,90%.

6. Investasi

Penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2006 meliputi investasi PMA sebanyak 38 unit usaha dengan nilai investasi sebesar US\$ 149,4 juta dan menyerap tenaga kerja 6.243 orang. Investasi PMDN 38 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 355,2 milyar dan menyerap tenaga kerja 9.438 orang. Investasi non-fasilitas sebanyak 25.653 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 1.450,8 milyar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 192.544 orang. Nilai total investasi pada tahun 2006 sebesar Rp 3.150,78 milyar, naik 0,99% dibanding tahun 2005.

7. Pertanian

Produktivitas pada sawah pada tahun 2006 rata-rata mencapai 57,48 Kw/Ha gabah kering giling (GKG), meningkat 0,33 Kw/Ha dibanding produktivitas tahun 2005. Dengan luas panen 43.994 hektar, diperoleh produksi 251.649 ton GKG yang memberikan surplus beras 90.063 ton atau 8,06% lebih tinggi dibanding surplus beras tahun 2005.

Dalam upaya mendukung berkembangnya usaha perikanan, dibangun 2 buah Balai Benih Ikan (BBI) yaitu di Rewulu dan Ngemplak, serta pemantapan petani pembenih ikan. Luas lahan perikanan

meningkat 13%, sedangkan produksi ikan konsumsi mencapai 6.458,39 ton (meningkat 32,40%) dan produksi benih ikan mencapai 427.441.200 ekor (meningkat 35,53%). Rata-rata konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2006 mencapai 20,3 kg/kapita.

F. Kondisi Sosial Budaya

1. Kependudukan

Selama periode tahun 2003-2006 banyaknya penduduk Kabupaten Sleman bertambah 30.847 orang yaitu dari 884.776 orang pada akhir tahun 2003 menjadi 915.623 orang pada akhir tahun 2006, atau rata-rata pertahun meningkat sebesar 1,15%. Selama 4 tahun, penduduk yang datang sebanyak 30.889 orang, sehingga terjadi migrasi masuk netto sebanyak 20.311 orang.

Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 1,45% karena tingginya angka migrasi *netto* yang mencapai 6.559 jiwa, sementara selama periode tahun 2003-2006 rata-rata angka migrasi netto hanya 5.078 jiwa. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,17%, sedangkan pada tahun 2006 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,11%.

2. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman meningkat rata-rata 2,00% per tahun yaitu dari 792.013 orang pada tahun 2002 menjadi 871.121 orang pada tahun 2006. Tingkat pengangguran terbuka, yaitu rasio antara

mereka yang mencari kerja dan angkatan kerja, pada tahun 2006 tercatat 10,06%.

Selama periode tahun 2002-2006, banyaknya penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman bertambah dari 792.013 jiwa menjadi 871.121 jiwa atau bertambah sebanyak 79.108 jiwa, sedangkan banyaknya angkatan kerja meningkat dari 480.627 jiwa menjadi 514.469 jiwa atau bertambah sebanyak 33.842 jiwa. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami sedikit penurunan dari 60,68% pada tahun 2002 menjadi 59,06% pada tahun 2006.

Tiga sektor perekonomian yang secara proporsional menyerap tenaga kerja paling banyak pada tahun 2006 adalah sektor jasa-jasa (25,60%), perdagangan (22,88%), dan pertanian (21,61%). Perusahaan yang telah menerapkan UMP sebanyak 46 perusahaan (95%) dari 48 perusahaan, perselisihan perburuhan diselesaikan 66 kasus (80,95%) dari 69 kasus, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebesar 55%.

Balai Latihan Kerja (BLK) Sleman berperan penting dalam meningkatkan kualitas pencari kerja melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan institusional maupun non-institusional. Pelatihan yang diberikan meliputi: kejuruan otomotif, listrik, teknologi mekanik, bangunan, aneka kejuruan, tata niaga, dan pertanian.

Pada tahun 2006, animo pelatihan BLK Sleman sebanyak 1.346 orang dan berhasil dididik sebanyak 556 orang (41,31%). Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan pada tahun 2006 mencapai 56%.

3. Kesenian dan Kebudayaan

Organisasi kesenian yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2006 sebanyak 887 kelompok terdiri dari kelompok tari 274 kelompok, musik 492 kelompok, sastra 11 kelompok, teater tradisional 45 kelompok, lawak 1 kelompok, wayang kulit 43 kelompok, wayang orang 8 kelompok, wayang klitik 1 kelompok, wayang sembung 1 kelompok, dan drama tari 11 kelompok.

Peninggalan sejarah dan nilai tradisional berupa bangunan perjuangan 1 buah, bangunan candi/situs 68 buah, gua sejarah 4 buah, makam untuk ziarah 4 buah, masjid peninggalan 4 buah, peninggalan pesanggrahan 2 buah, museum 9 buah, dan kegiatan upacara adat 11 jenis.

Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan kebudayaan telah dibentuk 12 desa budaya dan 7 desa wisata, serta ditetapkan 2 kawasan cagar budaya yaitu Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, dan Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan.

4. Agama

Pada tahun 2006, pemeluk agama Islam di Kabupaten Sleman sebanyak 826.209 jiwa, Katolik 52.277 jiwa, Kristen 25.614 jiwa; Hindu 1.176 jiwa, dan Budha 652 jiwa. Kehidupan intern umat dan antar agama di Kabupaten Sleman berlangsung dalam kondisi rukun dan damai. Sarana ibadah yang ada berupa masjid 1.838 buah, mushola 510 buah, langgar 1.040 buah, gereja Katolik 52 buah, kapel 21 buah, gereja Kristen 63 buah, rumah kebaktian 10 buah, pura 2 buah, dan vihara 3 buah. Selain itu

terdapat 108 pondok pesantren dengan jumlah santri 14.317 orang, TKA 26 unit, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) 775 buah, penyuluh agama Islam 420 orang, ulama 345 orang, khotib 1.811 orang, mubaligh 2.213 orang, dan mubalighot 73 orang.

G. Pemerintahan

Sejak melaksanakan otonomi daerah yang luas pasca reformasi nasional terutama dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. *Pertama*, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 organisasi perangkat daerah terdiri dari 2 Sekretariat, 7 dinas, 4 badan, 3 kantor, dan 17 kecamatan. Pembentukan organisasi itu merupakan perubahan 22 dinas, 1 badan, 1 kantor yang dibentuk pada tahun 1995 sebagai implementasi percontohan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. *Kedua*, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 organisasi perangkat daerah diubah menjadi 2 sekretariat, 9 dinas, 6 badan, 6 kantor, dan 17 kecamatan. Di samping itu, tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan juga dijalankan oleh 86 pemerintah desa yang karena berdasarkan asal-usul pembentukannya memiliki otonomi asli dan mengelola sumber-sumber keuangan dan aset tersendiri.

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2005 sebanyak 12.936 orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan yaitu:

SD 289 orang (2,23%) SLTP 513 orang (3,97%) SLTA 3.820 orang (29,53%) D1-D3 4.187 orang (32,37%) D4,S1, dan S2 4.127 orang (31,90%).

Sebagai arah dan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Sleman telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2006-2025 yang diatur dalam Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2005 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2010 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14/Per.Bup/2005. Dasar filosofi pembangunan daerah Kabupaten Sleman adalah “Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kerta Raharja”. Implementasi filosofi pembangunan juga diwujudkan dalam slogan pembangunan desa terpadu “Sleman Sembada”. Sembada merupakan singkatan dari sehat; elok; dan edi; makmur dan merata; bersih dan berbudaya; aman dan adil. Visi pembangunan daerah adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing”. Misi yang diemban adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Varians Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Periode Tahun 2003 - 2007

1. Analisis Varians APBD Tahun 2003

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians terhadap APBD tahun anggaran 2003 dapat diketahui bahwa pos pendapatan terdapat varians sebesar Rp. 28.706.870.218,10 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos pendapatan ini terdiri dari pos pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada pos pendapatan asli daerah yang terdiri dari pos pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan diperoleh kesimpulan menguntungkan yaitu dengan varians sebesar Rp. 9.478.550.677,69. Namun pada pos bagian laba badan usaha daerah terdapat varians minus Rp. 191.940.784,40 sehingga diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan. Pos dana perimbangan yang terdiri dari pos bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan dari propinsi terdapat varians sebesar Rp. 9.394.533.971,41 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Dalam pos dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak terdapat varians antara realisasi dengan yang dianggarkan sehingga diperoleh kesimpulan efektif. Pos lain-lain pendapatan yang sah terdapat varians sebesar Rp. 9.833.785.569,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

Pos belanja dibagi menjadi dua, yaitu belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Pos belanja aparatur daerah terdiri dari beberapa pos, yaitu: belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pos belanja administrasi umum terdiri atas belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan terdapat varians sebesar Rp. 1.716.209.085,88 dan kesimpulannya adalah menguntungkan. Pos belanja operasi pemeliharaan yang terdiri atas belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan terdapat varians sebesar Rp. 2.744.903.527,05 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos belanja modal terdapat varians minus Rp. 26.460.622.030,98 dan kesimpulannya adalah tidak menguntungkan.

Pos belanja pelayanan publik terdiri atas pos belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Pos belanja administrasi umum terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan terdapat varians sebesar Rp. 13.929.545.155,50 dan kesimpulannya adalah menguntungkan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan terdapat varians sebesar Rp. 879.568.175,80 dan kesimpulannya adalah menguntungkan. Pos belanja bagi hasil dan bantuan keuangan terdapat varians sebesar Rp. 570.138.085,00 kesimpulannya adalah

menguntungkan. Pos belanja tak tersangka terdapat varians sebesar Rp. 2.883.127.281,96 dan kesimpulannya adalah menguntungkan.

Pos pembiayaan terdiri dari pos penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pos penerimaan daerah yang terdiri dari atas sisa perhitungan anggaran tahun lalu tidak terdapat varians antara realisasi dengan yang dianggarkan sehingga diperoleh kesimpulan efektif. Pos pengeluaran daerah yang terdiri atas sisa lebih perhitungan tahun berjalan ini tidak dianggarkan tetapi dalam realisasi ada.

2. Analisis Varians APBD Tahun 2004

Pos pendapatan terdiri atas pos pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pada pos pendapatan asli daerah terdapat varians sebesar Rp. 6.193050.526,77 dan secara umum diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos pendapatan asli daerah ini terdiri dari pos pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha daerah, dan lain-lain pendapatan. Namun pada pos lain-lain pendapatan diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan, yaitu dengan varians sebesar Rp. 659.366.317,84. Pos dana perimbangan yang terdiri dari pos bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana dari propinsi diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 16.140.112.236,41. Dalam pos dana alokasi khusus diperoleh kesimpulan efektif karena tidak ada selisih antara realisasi dengan yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 9.480.000.000,00. Pos lain-lain pendapatan yang sah

diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 9.877.436.860,00.

Pos belanja terdiri atas belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Pos belanja aparatur daerah ini terdiri dari pos belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pada pos belanja administrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 21.454.807.472,67 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri dari belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 4.350.652.174,00. Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pos belanja modal juga diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 844.285.523,58.

Pos belanja pelayanan publik terdiri dari pos belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Pada pos belanja administrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 7.280.962.054,60 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 1.406.321.433,25. Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja

perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pos belanja modal terdapat varians sebesar Rp. 5.529.988.641,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos belanja bagi hasil dan bantuan keuangan diperoleh varians sebesar Rp. 348.238.141,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos belanja tak tersangka diperoleh varians sebesar Rp. 267.445.694,68 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

Pos pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada pos penerimaan daerah terdapat varians sebesar Rp. 26.167.794.486,55 dan diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan. Pos ini terdiri atas sisa perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, dan pengembalian penguatan modal dinas perhutanan dan P2KPM. Pada pos sisa perhitungan anggaran tahun lalu terdapat varians sebesar Rp. 28.241.363,45 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pada pos penerimaan pinjaman obligasi tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena dalam realisasi tidak terjadi transaksi penerimaan sedangkan dalam anggaran telah dianggarkan sebesar Rp. 28.300.000.000,00. Pada pos pengembalian penguatan modal dinas perhutanan dan P2KPM juga tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena dalam anggaran tidak ada namun dalam realisasinya ada transaksi penerimaan sebesar Rp. 1.653.964.150,00.

Pos pengeluaran daerah terdapat varians sebesar Rp. 47.075.504.271,41 dan diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan. Varians sebesar Rp. 47.075.504.271,41 ini hampir sembilan kali lipat atau

897,56% dari selisih antara realisasi dengan yang dianggarkan. Pos pengeluaran daerah ini terdiri atas sisa perhitungan tahun berjalan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, piutang PSS, dan piutang sekretariat. Pada pos sisa perhitungan tahun berjalan tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena dalam anggaran tidak ada namun dalam realisasinya terjadi transaksi pengeluaran daerah sebesar Rp. 42.851.956.277,01. Pada pos penyertaan modal diperoleh kesimpulan efisien karena tidak ada varians antara realisasi dengan yang dianggarkan. Pos pembayaran utang pokok yang jatuh tempo terdapat varians sebesar Rp 5,60 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pada pos piutang PSS tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena dalam anggaran tidak dianggarkan namun dalam realisasinya terjadi transaksi pengeluaran daerah sebesar Rp. 3.660.898.000,00. Pos piutang sekretariat juga tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena dalam anggaran tidak dianggarkan namun dalam realisasinya terjadi transaksi pengeluaran daerah sebesar Rp. 552.650.000,00

3. Analisis Varians APBD Tahun 2005

Pos pendapatan terdiri atas pos pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada pos pendapatan asli daerah terdapat varians sebesar Rp. 11.393.061.285,20 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha daerah, dan lain-lain pendapatan. Pos dana

perimbangan terdapat varians sebesar Rp. 21.256.902.174,84 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan dari propinsi. Pada pos dana alokasi umum dan adana alokasi khusus diperoleh kesimpulan efektif karena tidak terdapat selisih antara realisasi dengan yang dianggarkan. Pos lain-lain pendapatan yang sah juga diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 3.000.000.000.

Pos belanja terdiri atas belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Pos belanja aparatur daerah ini terdiri dari pos belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pada pos belanja admistrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 24.215.574.803,43 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri dari belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 6.977.368.170,90. Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pos belanja modal terdapat varians sebesar Rp. 2.325.047.100,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

Pos belanja pelayanan publik terdiri dari pos belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Pada pos belanja administrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 17.382.045.442,00 dan

diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 2.979.061.100,00. Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pos belanja modal terdapat varians sebesar Rp. 6.758.071.001,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos belanja bagi hasil dan bantuan keuangan diperoleh varians sebesar Rp. 2.568.628.502,50 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos belanja tak tersangka diperoleh varians sebesar Rp. 2.104.438.013,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

Pos pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada pos penerimaan daerah terdapat varians sebesar Rp. 49.625.632.597,99 dan diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan. Pos ini terdiri atas sisa perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman, penerimaan piutang, dan pengembalian penguatan modal. Pada pos sisa perhitungan anggaran tahun lalu tidak terdapat varians antara realisasi dengan yang dianggarkan sehingga diperoleh kesimpulan efektif. Pada pos penerimaan pinjaman tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena tidak dianggarkan. Pada pos penerimaan piutang dan pengembalian penguatan modal juga tidak dapat dilakukan analisis varians karena tidak dianggarkan.

Pada pos pengeluaran daerah terdapat varians sebesar Rp. 51.642.559.994,88 dan diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan. Varians sebesar Rp. 51.642.559.994,88 ini lebih dari tujuh kali lipat atau 706,12% dari selisih antara realisasi dengan yang dianggarkan. Pos pengeluaran daerah ini terdiri atas sisa perhitungan tahun berkenan, penguatan modal, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, piutang PSS, dan piutang sekretariat. Pada pos sisa perhitungan tahun berjalan tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena dalam anggaran tidak ada namun dalam realisasinya terjadi transaksi pengeluaran daerah sebesar Rp. 51.689.560.066,48. Pada pos penguatan modal terdapat varians sebesar Rp. 47.000.000,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pada pos penyertaan modal diperoleh kesimpulan efisien karena tidak ada varians antara realisasi dengan yang dianggarkan. Pos pembayaran utang pokok yang jatuh tempo terdapat varians sebesar Rp 71,60 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pada pos piutang PSS tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena baik dalam anggaran maupun realisasinya tidak ada. Pos piutang sekretariat juga tidak diambil kesimpulan dari analisis varians karena baik dalam anggaran maupun realisasinya tidak ada.

4. Analisis Varians APBD Tahun 2006

Pos pendapatan terdiri atas pos pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada pos pendapatan asli daerah terdapat varians sebesar Rp. 14.917.774.787,40 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha daerah, dan lain-lain pendapatan. Pos dana perimbangan terdapat varians sebesar Rp. 33.722.485.636,89 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan dari propinsi. Pada pos dana alokasi umum diperoleh kesimpulan efektif karena tidak terdapat selisih antara realisasi dengan yang dianggarkan. Pos lain-lain pendapatan yang sah tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena tidak ada dalam anggaran maupun realisasinya.

Pos belanja terdiri atas belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Pos belanja aparatur daerah ini terdiri dari pos belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pada pos belanja admistrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 30.554.502.195.,26 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri dari belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 8.269.835.441,14. Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pada pos belanja

perjalanan dinas diperoleh kesimpulan efisien karena tidak terdapat varians antara anggaran dengan realisasinya. Pos belanja modal terdapat varians sebesar Rp. 2.325.047.100,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

Pos belanja pelayanan publik terdiri dari pos belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Pada pos belanja administrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 27.229.906.336,66 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 4.309.542.837,00. Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pos belanja modal terdapat varians sebesar Rp. 29.635.825.796,99 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos belanja bagi hasil dan bantuan keuangan diperoleh varians sebesar Rp. 3.287.822.394,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos belanja tak terduga diperoleh varians sebesar Rp. 251.582.618,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

Pos pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada pos penerimaan daerah terdapat varians sebesar Rp. 20.077.257.366,52 dan diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan. Pos ini terdiri atas sisa perhitungan anggaran tahun lalu dengan varians sebesar Rp. 1.746.784,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan serta penerimaan

pinjaman yang tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena tidak ada dalam realisasinya. Pada pos pengeluaran daerah diperoleh kesimpulan efisien karena tidak terdapat varians antara anggaran dengan realisasinya. Pos ini terdiri atas penguatan modal, penyertaan modal, dan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.

5. Analisis Varians Tahun 2007

Pos pendapatan secara umum diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 49.287.757.772,00. Pos pendapatan ini terdiri atas pendapatan asli daerah, pendanaan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada pos pendapatan asli daerah terdapat varians sebesar Rp. 25.760.102.001,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pos pendanaan transfer ada dua macam, yaitu transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan dan transfer pemerintah propinsi. Pada pos transfer pemerintah pusat terdapat varians sebesar RP. 11.879.820.961,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas dana bagi hasil pajak dan non-pajak, dana alokasi umum, dana aloksi khusus, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk pendidikan. Pada pos bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk pendidikan tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena dalam anggaran tidak ada tetapi dalam realisasinya ada bantuan sebesar Rp. 5.613.532.600,00. Pos transfer

pemerintah propinsi terdapat varian sebesar Rp. 7.476.431.700,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemda lain, dan bantuan dari propinsi atau pemda lain. Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians tidak ada dalam rencana anggaran, namun dalam realisasinya ada. Pos ini terdiri atas pendapatan hibah dan kompensasi pajak penghasilan.

Pos belanja terdapat varians sebesar Rp. 144.462.329.958,50 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas belanja operasi belanja modal dan belanja tak terduga. Pada pos belanja operasi terdapat varians sebesar Rp. 92.885.449.207,48 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja bantuan social. Pos belanja modal terdapat varians sebesar Rp. 43.673.578.761,02 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi, dan bangunan; dan belanja asset tetap lainnya. Pos belanja tak terduga tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena dalam rencana anggaran ada namun dalam realisasinya dana tersebut tidak digunakan.

Pos trsansfer terdapat varians sebesar Rp. 262.299.158,96 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas belanja bagi

hasil kepada pemerintah propinsi/kabupaten/desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah propinsi/kabupaten/desa.

Pos pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada pos penerimaan pembiayaan daerah terdapat varian sebesar Rp. 1.750.823.197,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas penggunaan SILPA dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Pos penggunaan SILPA diperoleh kesimpulan efektif karena tidak terdapat varians antara anggaran dengan realisasi. Pos penerimaan kembali pinjaman daerah tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena tidak ada dalam rencana anggaran namun dalam realisasinya terjadi penerimaan sebesar Rp. 1.750.823.200,00. Pos pengeluaran pembiayaan daerah terdapat varians sebesar Rp. 255.071,60 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas penyertaan modal (investasi) pemda, pembayaran pokok pinjaman ke pemerintah pusat, pemberian pinjaman daerah, dan restitusi pajak. Pada pos penyertaan modal (investasi) pemda, pemberian pinjaman daerah dan restitusi pajak diperoleh kesimpulan menguntungkan karena tidak terdapat selisih antara anggaran dengan realisasi. Pos pembayaran pokok pinjaman ke pemerintah pusat terdapat varians sebesar Rp. 255.071,60 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

B. Analisis Tingkat Kemandirian Pembiayaan, Tingkat Ketergantungan dan Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Periode Tahun 2003 - 2007

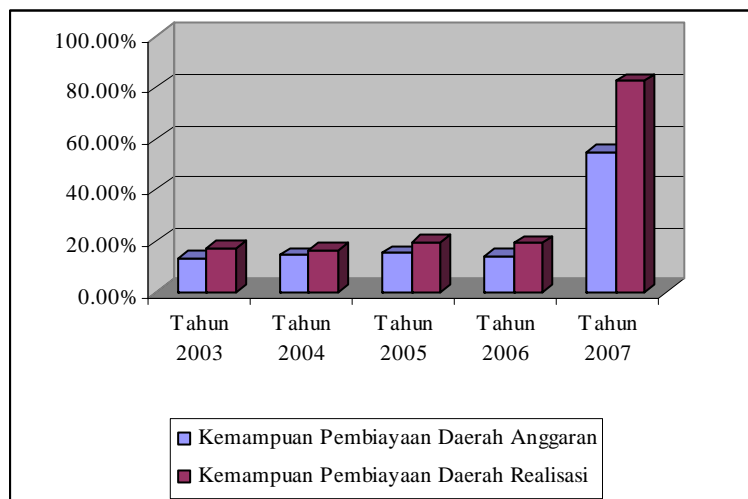
Tabel 5.1
Tingkat Kemampuan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003 – 2007

Tahun	Kemampuan Pembiayaan Daerah		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	
Tahun 2003	13.20%	17.14%	29.86%
Tahun 2004	14.26%	16.55%	16.04%
Tahun 2005	15.18%	19.17%	26.29%
Tahun 2006	14.01%	19.05%	35.95%
Tahun 2007	54.54%	82.48%	51.22%

Sumber : BPKKD Kab. Sleman (data diolah penulis)

Tabel di atas menunjukkan tingkat kemampuan pembiayaan daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2003 – 2007. Rasio yang memuat perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja rutin non-pegawai ini menunjukkan adanya nilai realisasi yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran dalam setiap tahun. Hal ini bermakna bahwa kemampuan pembiayaan daerah Kabupaten Sleman adalah baik karena mampu mencapai bahkan melebihi target dalam setiap tahun. Hal ini juga dapat dilihat pada grafik perkembangan tingkat kemampuan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun di bawah ini:

Gambar 5.1
Diagram Perkembangan Tingkat Kemampuan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007



Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat kecenderungan kemampuan daerah dalam pembiayaan pada tahun 2003 - 2007. Analisis trend dilakukan dengan uji regresi linear sederhana dengan formula, sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = kemampuan daerah dalam pembiayaan di tahun $t+1$

a = konstanta

b = koefisien regresi

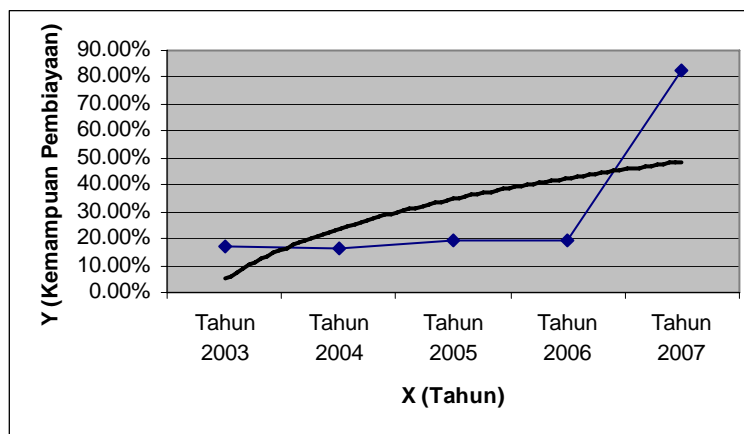
X = waktu (tahun)

Hasil pengujian regresi linear sederhana yang dilakukan menghasilkan persamaan trend, sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

$$= -0.09077 + 0.133 X$$

Gambar 5.2
Trend Perkembangan Kemampuan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007



Tabel 5.2
Tingkat Kemampuan Mobilisasi Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007

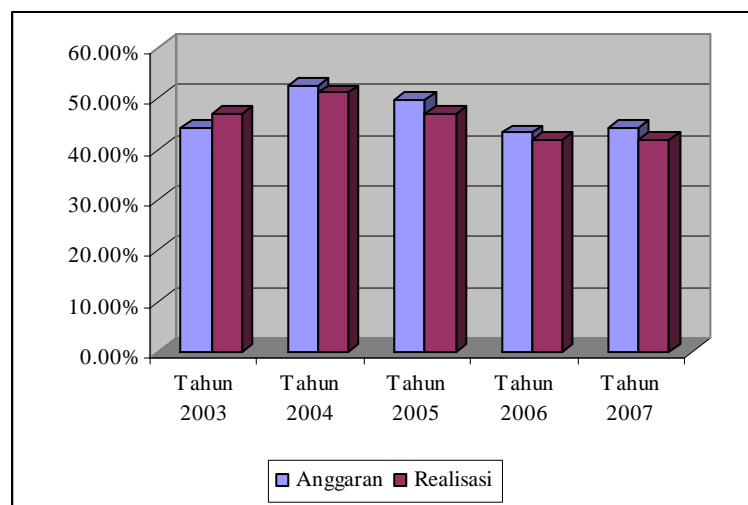
Tahun	Kemampuan Mobilisasi Daerah		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	
Tahun 2003	44.37%	47.02%	5.96%
Tahun 2004	52.54%	51.10%	-2.74%
Tahun 2005	49.72%	47.03%	-5.40%
Tahun 2006	43.21%	41.87%	-3.10%
Tahun 2007	44.26%	41.68%	-5.83%

Sumber : BPKKD Kab. Sleman (data diolah penulis)

Tabel di atas menunjukkan tingkat kemampuan mobilisasi daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2003-2007. Rasio yang memuat perbandingan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) ini menunjukkan adanya nilai realisasi yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan anggaran dalam setiap tahun. Keberhasilan melebihi anggaran yang ditetapkan hanya tercapai pada tahun 2003. Hal ini bermakna bahwa

kemampuan mobilisasi daerah Kabupaten Sleman adalah relatif kurang baik karena belum mampu mencapai bahkan melebihi target dalam setiap tahun secara konsisten. Hal ini juga dapat dilihat pada grafik perkembangan tingkat kemampuan mobilisasi daerah dari tahun ke tahun di bawah ini.

Gambar 5.3
Diagram Perkembangan Tingkat Kemampuan Mobilisasi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007



Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat kecenderungan kemampuan mobilisasi daerah dalam pembiayaan pada tahun 2003-2007. Analisis trend dilakukan dengan uji regresi linear sederhana dengan formula, sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = kemampuan mobilisasi daerah di tahun $t+1$

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = waktu (tahun)

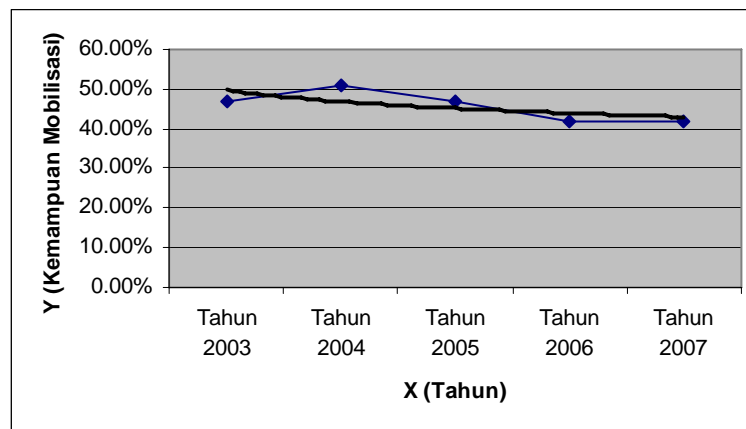
Hasil pengujian regresi linear sederhana yang dilakukan menghasilkan persamaan trend, sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

$$= 0.517 - 0.01991 X$$

Persamaan regresi linear sederhana di atas terkait dengan trend perkembangan tingkat kemampuan mobilisasi daerah dari tahun ke tahun dapat diwujudkan dalam bentuk grafik di bawah ini.

Gambar 5.4
Trend Perkembangan Kemampuan Mobilisasi Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007



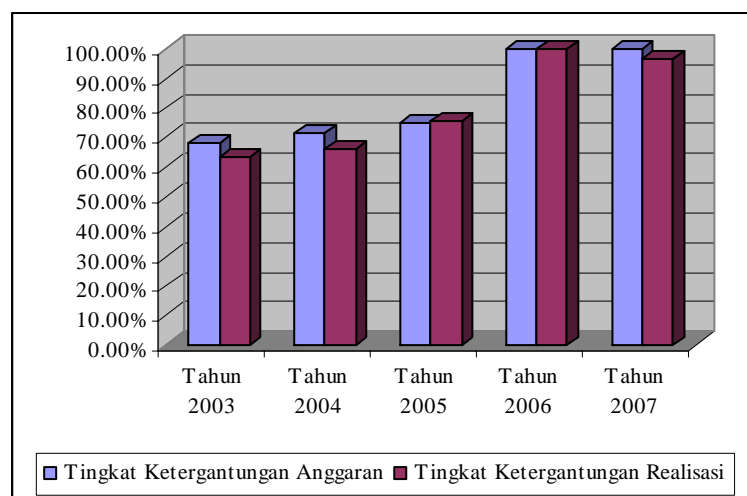
Tabel 5.3
Tingkat Ketergantungan
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007

Tahun	Tingkat Ketergantungan		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	
Tahun 2003	68.12%	63.70%	-6.49%
Tahun 2004	71.74%	65.89%	-8.15%
Tahun 2005	74.95%	75.54%	0.78%
Tahun 2006	100.00%	100.00%	0.00%
Tahun 2007	100.00%	96.66%	-3.34%

Sumber : BPKKD Kab. Sleman (data diolah penulis)

Tabel di atas menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Sleman selama tahun 2003-2007. Rasio yang memuat perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan penerimaan APBD tanpa subsidi ini menunjukkan adanya nilai realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang dibuat, yaitu pada tahun 2003, 2004 dan 2007. Keberhasilan melebihi anggaran yang ditetapkan tercapai pada tahun 2005 dan 2006. Hal ini bermakna bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Sleman adalah relatif baik pada tahun 2003, 2004 dan 2007, karena mampu merealisasikan tingkat ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat ketergantungan yang dianggarkan. Hal ini juga dapat dilihat pada grafik perkembangan tingkat ketergantungan daerah dari tahun ke tahun di bawah ini.

Gambar 5.5
Diagram Perkembangan Tingkat Ketergantungan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007



Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat kecenderungan tingkat ketergantungan daerah pada tahun 2003-2007. Analisis trend dilakukan dengan uji regresi linear sederhana dengan formula, sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y = tingkat ketergantungan daerah di tahun t+1

a = konstanta

b = koefisien regresi

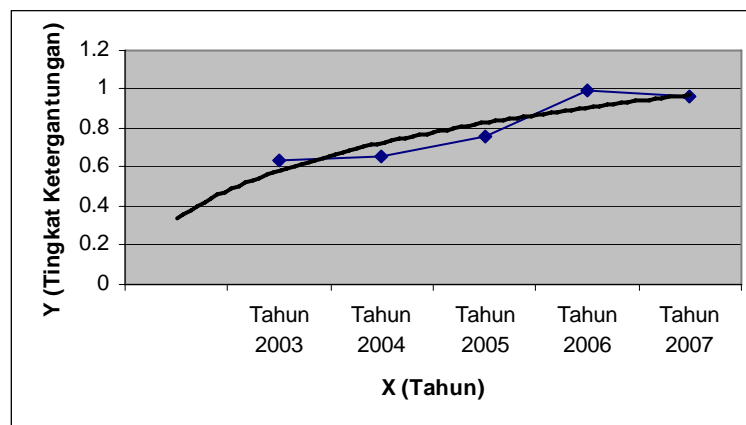
X = waktu (tahun)

Hasil pengujian regresi linear sederhana yang dilakukan menghasilkan persamaan trend, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y' &= a + bX \\ &= 0.503 + 0.100 X \end{aligned}$$

Persamaan regresi linear sederhana di atas terkait dengan trend perkembangan tingkat ketergantungan daerah dari tahun ke tahun dapat diwujudkan dalam bentuk grafik di bawah ini.

Gambar 5.6
Trend Perkembangan Tingkat Ketergantungan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007



Tabel 5.4
Desentralisasi Fiskal
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007

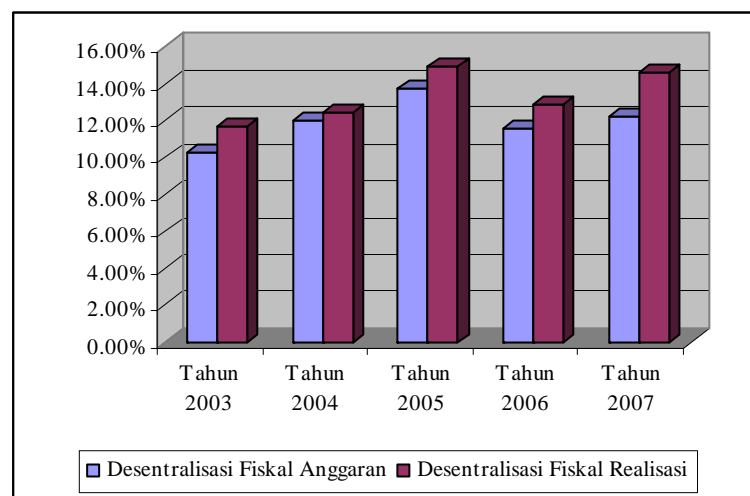
Tahun	Desentralisasi Fiskal		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	
Tahun 2003	10.25%	11.70%	14.07%
Tahun 2004	12.01%	12.49%	4.02%
Tahun 2005	13.73%	14.97%	9.04%
Tahun 2006	11.58%	12.90%	11.40%
Tahun 2007	12.23%	14.62%	19.55%

Sumber : BPKKD Kab. Sleman (data diolah penulis)

Tabel di atas menunjukkan desentralisasi fiskal Kabupaten Sleman selama tahun 2003-2007. Rasio yang memuat perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah ini menunjukkan adanya nilai realisasi yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran dalam setiap tahun. Hal ini dapat menjadi indikator adanya kemampuan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memaksimalkan PAD yang ditunjukkan dengan kinerja realisasinya yang

lebih besar daripada anggaran yang ditetapkan dalam setiap tahun. Hal ini juga dapat dilihat pada grafik perkembangan desentralisasi fiskal daerah dari tahun ke tahun di bawah ini.

Gambar 5.7
Diagram Perkembangan Desentralisasi Fiskal
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007



Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat kecenderungan desentralisasi fiskal pada tahun 2003-2007. Analisis trend dilakukan dengan uji regresi linear sederhana dengan formula, sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

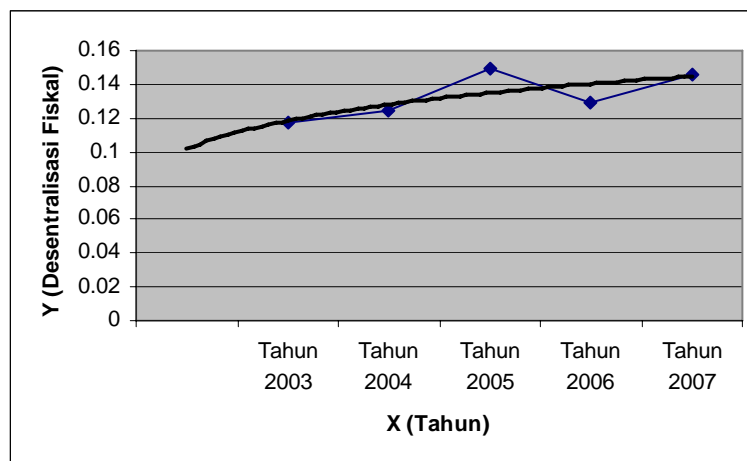
- Y' = desentralisasi fiskal di tahun t+1
- a = konstanta
- b = koefisien regresi
- X = waktu (tahun)

Hasil pengujian regresi linear sederhana yang dilakukan menghasilkan persamaan trend, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y' &= a + bX \\ &= 0.115 + 0.006268 X \end{aligned}$$

Persamaan regresi linear sederhana di atas terkait dengan trend perkembangan desentralisasi fiskal dari tahun ke tahun dapat diwujudkan dalam bentuk grafik di bawah ini.

Gambar 5.8
Trend Perkembangan Desentralisasi Fiskal
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis varians, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode tahun 2003 – 2007 menunjukkan indikasi yang baik. Hal ini mengacu pada hasil analisis varians pada APBD yang menunjukkan adanya realisasi pendapatan daerah yang meningkat dibandingkan dengan anggarannya. Sementara pada aspek belanja daerah, diketahui bahwa nilai realisasi belanja daerah lebih kecil daripada anggarannya.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode tahun 2003 – 2007 menunjukkan kinerja yang kecenderungan meningkat dilihat dari aspek kemampuan pembiayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah serta desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang positif pada ketiga variabel tersebut. Namun untuk variabel kemampuan mobilisasi daerah menunjukkan kinerja yang cenderung menurun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang negatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu lebih meningkatkan kemampuan mobilisasi daerahnya melalui upaya penggalian sumber-sumber baru untuk pemungutan pajak serta lebih mengintensifkan sumber-sumber lama yang selama ini belum dapat dipungut secara maksimal.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman juga perlu menurunkan tingkat ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat melalui peningkatan porsi kontribusi PAD dalam APBD Sleman. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi potensi daerah yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD serta meningkatkan sumber-sumber PAD yang belum terkelola secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan. 2005. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Fiscal Stress (Studi terhadap Beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Vol.06, No. 02, Agustus 2005, 105 – 124.*
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik dan Penerapannya di Indonesia.* Yogyakarta : BPF.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar.* Jakarta : Salemba Empat.
- Dishubkominfo Pemerintah kabupaten Sleman. 2010. *RPJM 2005-201 Kabupaten Sleman.* <http://www.slemankab.go.id>.
- Dishubkominfo Pemerintah kabupaten Sleman. 2010. *Daftar Pejabat Eksekutif di Kabupaten Sleman.* <http://www.slemankab.go.id>.
- Dishubkominfo Pemerintah kabupaten Sleman. 2010. *Daftar Kecamatan di Kabupaten Sleman.* <http://www.slemankab.go.id>.
- Dishubkominfo Pemerintah kabupaten Sleman. 2010. *Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Sleman.* <http://www.slemankab.go.id>.
- Dishubkominfo Pemerintah kabupaten Sleman. 2010. *Karakteristik Wilayah Kabupaten Sleman.* <http://www.slemankab.go.id>.
- Dishubkominfo Pemerintah kabupaten Sleman. 2010. *Topografi Kabupaten Sleman.* <http://www.slemankab.go.id>.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan daerah.* Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi Offset
- Muryani. 2005. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan Laporan Perhitungan APBD. *Skripsi.* Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Nadeak, Rusliana. 2003. Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Nugroho, Damasus Susilo. 2003. Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Prahmawati, Krisna Wahyu. 2006. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Sleman, 2004 Annual Report.

Sleman, 2005 Annual Report.

Sleman, 2007 Annual Report.

_____, 1999, “ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah*”. Jakarta : Absolut

_____, 2000, “*Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah* “. Jakarta : Absolut

_____, 2004, “*Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tentang Pedoman kepengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*”.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**) 70

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 926 / 2009

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Ketua Program Studi Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor: 31/Kaprodi Akt./418/IV/2009 Tanggal: 20 April 2009 Hal: Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **ALUISIUS HERI PURNOMO**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 042114032
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : USD Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta
Alamat Rumah : Ngepas Kidul Rt 03/18 Donoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
No. Telp / Hp : 085643814630
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
**"PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN"**
Lokasi : Kab.Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 24 April 2009 s/d
24 Juli 2009

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar atau CD kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

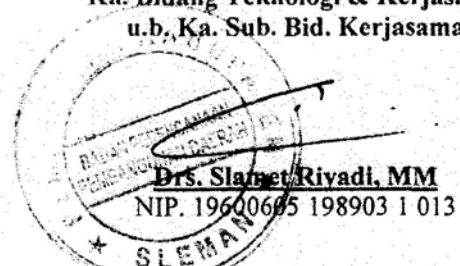
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 24 April 2009

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. Dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. BKKD Kab.Sleman
4. Ka. BKD Kab.Sleman
5. Dekan Fak. Ekonomi – USD Yk.
6. Pertinggal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama



Analisis Peramalan dengan Regresi Linear Sederhana Kemampuan Pembiayaan Daerah

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tahun ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kemampuan Pembiayaan Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.729 ^a	.532	.376	.22806

Model Summary

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.532	3.410	1	3	.162

a. Predictors: (Constant), Tahun

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.177	1	.177	3.410	.162 ^a
	Residual	.156	3	.052		
	Total	.333	4			

a. Predictors: (Constant), Tahun

b. Dependent Variable: Kemampuan Pembiayaan Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.077E-02	.239		-.380	.730
	Tahun	.133	.072	.729	1.847	.162

a. Dependent Variable: Kemampuan Pembiayaan Daerah

Analisis Peramalan dengan Regresi Linear Sederhana Kemampuan Mobilisasi Daerah

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tahun ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kemampuan Mobilisasi Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.790 ^a	.624	.499	.02819

Model Summary

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.624	4.988	1	3	.112

a. Predictors: (Constant), Tahun

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.004	1	.004	4.988	.112 ^a
	Residual	.002	3	.001		
	Total	.006	4			

a. Predictors: (Constant), Tahun

b. Dependent Variable: Kemampuan Mobilisasi Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.517	.030		17.492	.000
	Tahun	-1.991E-02	.009	-.790	-2.233	.112

a. Dependent Variable: Kemampuan Mobilisasi Daerah

Analisis Peramalan dengan Regresi Linear Sederhana Tingkat Ketergantungan Daerah

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tahun ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Tingkat Ketergantungan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.928 ^a	.861	.815	.07326

Model Summary

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.861	18.642	1	3	.023

a. Predictors: (Constant), Tahun

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.100	1	.100	18.642	.023 ^a
	Residual	.016	3	.005		
	Total	.116	4			

a. Predictors: (Constant), Tahun

b. Dependent Variable: Tingkat Ketergantungan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.503	.077		6.553	.007
	Tahun	.100	.023	.928	4.318	.023

a. Dependent Variable: Tingkat Ketergantungan

Analisis Peramalan dengan Regresi Linear Sederhana Desentralisasi Fiskal

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tahun ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Desentralisasi Fiskal

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.705 ^a	.497	.330	.01151

Model Summary

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.497	2.967	1	3	.183

a. Predictors: (Constant), Tahun

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	1	.000	2.967	.183 ^a
	Residual	.000	3	.000		
	Total	.001	4			

a. Predictors: (Constant), Tahun

b. Dependent Variable: Desentralisasi Fiskal

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.115	.012		9.492	.002
	Tahun	6.268E-03	.004	.705	1.722	.183

a. Dependent Variable: Desentralisasi Fiskal

Tabel 5.1
Analisis Varians
RINGKASAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

No	URAIAN	JUMLAH		VARIANS	%	KESIMPULAN	
		ANGGARAN	REALISASI				
1	2	Rp	3.00	4	5	6	7
I	PENDAPATAN						
A	Pendapatan Asli Daerah	43,494,146,800.00	52,972,697,477.69	9,478,550,677.69	121.792704	Menguntungkan	
	Pajak Daerah	19,300,000,000.00	24,907,210,488.00	5,607,210,488.00	129.0529041	Menguntungkan	
	Retribusi Daerah	13,136,561,000.00	14,246,405,051.75	1,109,844,051.75	108.4485129	Menguntungkan	
	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	2,502,558,000.00	2,310,617,215.60	(191,940,784.40)	92.33021635	Tidak Menguntungkan	
	Lain-lain Pendapatan	8,555,127,800.00	11,508,464,722.34	2,953,336,922.34	134.5212484	Menguntungkan	
B	Dana Perimbangan	360,322,608,000.00	369,717,141,971.41	9,394,533,971.41	102.6072563	Menguntungkan	
	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	24,876,641,000.00	29,173,396,369.00	4,296,755,369.00	117.272249	Menguntungkan	
	Dana Alokasi Umum	304,780,000,000.00	304,780,000,000.00	-	100	Efektif	
	Dana Alokasi Khusus	10,600,000,000.00	10,600,000,000.00	-	100	Efektif	
	Dana Perimbangan dari Propinsi	20,065,967,000.00	25,163,745,602.41	5,097,778,602.41	125.4050981	Menguntungkan	
C	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	20,355,000,000.00	30,188,785,569.00	9,833,785,569.00	148.3114005	Menguntungkan	
	Jumlah Pendapatan	424,171,754,800.00	452,878,625,018.10	28,706,870,218.10	106.7677468	Menguntungkan	
II	BELANJA						
A	APARATUR DAERAH	146,454,915,201.00	138,454,424,609.05	(8,000,490,591.95)	94.53723313		
1	Belanja Administrasi Umum	71,983,342,196.00	70,267,133,110.12	(1,716,209,085.88)	97.61582467	Menguntungkan	
	Belanja Pegawai/Personalia	62,690,792,307.00	61,626,930,932.00	(1,063,861,375.00)	98.30300219	Menguntungkan	
	Belanja Barang dan Jasa	6,130,757,389.00	5,599,289,485.12	(531,467,903.88)	91.33112159	Menguntungkan	

	Belanja Perjalanan Dinas	1,456,351,200.00	1,388,288,260.00	(68,062,940.00)	95.32647482	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	1,705,441,300.00	1,652,624,433.00	(52,816,867.00)	96.90303812	Menguntungkan
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	33,730,665,738.00	30,985,762,210.95	(2,744,903,527.05)	91.86229069	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	13,058,841,448.00	11,293,206,541.95	(1,765,634,906.05)	86.47939089	Menguntungkan
	Belanja Barang dan Jasa	17,221,042,890.00	15,835,692,494.00	(1,385,350,396.00)	91.95547909	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	537,409,400.00	386,644,615.00	(150,764,785.00)	71.94600895	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	2,913,372,000.00	2,840,218,560.00	(73,153,440.00)	97.48904568	Menguntungkan
3	Belanja Modal	10,740,907,267.00	37,201,529,297.98	26,460,622,030.98	346.353696	Tidak Menguntungkan
B	PELAYANAN PUBLIK	329,501,581,401.96	309,021,859,814.77	(20,479,721,587.19)	93.78463633	Menguntungkan
1	Belanja Administrasi Umum	231,027,751,881.00	217,098,206,725.50	(13,929,545,155.50)	93.97061823	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	217,000,071,217.00	203,449,447,692.50	(13,550,623,524.50)	93.75547508	Menguntungkan
	Belanja Barang	12,773,618,214.00	12,403,207,476.50	(370,410,737.50)	97.10018938	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	18,490,000.00	18,474,900.00	(15,100.00)	99.91833423	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	1,235,572,450.00	1,227,076,656.50	(8,495,793.50)	99.31240022	Menguntungkan
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	29,913,423,756.00	29,033,855,580.20	(879,568,175.80)	97.05962051	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	4,806,200,806.00	4,618,017,053.00	(188,183,753.00)	96.08456324	Menguntungkan
	Belanja Barang	20,102,318,960.00	19,528,344,822.86	(573,974,137.14)	97.14473669	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	515,110,000.00	478,964,600.00	(36,145,400.00)	92.98297451	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	4,495,793,990.00	4,408,529,104.34	(87,264,885.66)	98.05896609	Menguntungkan
3	Belanja Modal	43,252,551,183.00	41,041,208,324.07	(2,211,342,858.93)	94.88737011	Menguntungkan
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	19,015,204,050.00	18,445,065,965.00	(570,138,085.00)	97.00167254	Menguntungkan
5	Belanja Tak Tersangka	6,286,650,531.96	3,403,523,250.00	(2,883,127,281.96)	54.1388969	Menguntungkan

	Jumlah Belanja	475,956,496,602.96	447,476,284,453.82	(28,480,212,149.14)	94.01621527	Menguntungkan
	Surplus/Defisit		5,402,340,564.28	5,402,340,564.28		
III	PEMBIAYAAN					
1	Penerimaan Daerah	44,999,641,802.96	44,999,641,802.96	-	100	Efektif
	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	44,999,641,802.96	44,999,641,802.96	-	100	Efektif
2	Pengeluaran Daerah	-	50,401,982,367.24	50,401,982,367.24		
	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan	-	50,401,982,367.24	50,401,982,367.24		
	Jumlah Pembiayaan	44,999,641,802.96	(5,402,340,564.28)	(50,401,982,367.24)		

Tabel 5.2
Analisis Varians
RINGKASAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

No	URAIAN	JUMLAH		VARIANS	%	KESIMPULAN
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAPATAN					
A	Pendapatan Asli Daerah	53,919,261,011.00	60,112,311,537.77	6,193,050,526.77	111.4857852	Menguntungkan
	Pajak Daerah	28,327,600,000.00	30,715,060,955.07	2,387,460,955.07	108.4280382	Menguntungkan
	Retribusi Daerah	19,300,864,000.00	21,911,584,143.90	2,610,720,143.90	113.5264418	Menguntungkan
	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	3,313,387,011.00	3,848,890,120.96	535,503,109.96	116.1618039	Menguntungkan
	Lain-lain Pendapatan	2,977,410,000.00	3,636,776,317.84	659,366,317.84	122.1456339	Tidak Menguntungkan
B	Dana Perimbangan	373,811,600,000.00	389,951,712,236.41	16,140,112,236.41	104.3177131	Menguntungkan
	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	32,350,000,000.00	38,534,157,863.00	6,184,157,863.00	119.1164076	Menguntungkan
	Dana Alokasi Umum	307,330,000,000.00	307,331,000,000.00	1,000,000.00	100.0003254	Menguntungkan
	Dana Alokasi Khusus	9,480,000,000.00	9,480,000,000.00	-	100	Efektif
	Dana Perimbangan dari Propinsi	24,651,600,000.00	34,606,554,373.41	9,954,954,373.41	140.3825893	Menguntungkan
C	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	21,240,000,000.00	31,117,436,860.00	9,877,436,860.00	146.50394	Menguntungkan
	Jumlah Pendapatan	448,970,861,011.00	481,181,460,634.18	32,210,599,623.18	107.1743185	Menguntungkan
II	BELANJA					
A	APARATUR DAERAH	143,594,709,400.51	116,944,964,230.26	(26,649,745,170.25)	81.44099787	Menguntungkan
1	Belanja Administrasi Umum	86,241,185,720.51	64,786,378,247.84	(21,454,807,472.67)	75.12231854	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	75,073,203,947.52	54,346,090,941.09	(20,727,113,006.43)	72.39079736	Menguntungkan
	Belanja Barang dan Jasa	8,032,957,272.99	7,495,090,690.75	(537,866,582.24)	93.30425192	Menguntungkan

	Belanja Perjalanan Dinas	1,387,338,000.00	1,274,066,550.00	(113,271,450.00)	91.83533861	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	1,747,686,500.00	1,671,130,066.00	(76,556,434.00)	95.61955568	Menguntungkan
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	31,993,401,130.00	27,642,748,956.00	(4,350,652,174.00)	86.40140773	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	13,598,365,500.00	11,742,150,450.00	(1,856,215,050.00)	86.34971938	Menguntungkan
	Belanja Barang dan Jasa	16,276,464,630.00	14,143,653,076.00	(2,132,811,554.00)	86.89634634	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	765,928,700.00	502,104,600.00	(263,824,100.00)	65.55500532	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	1,352,642,300.00	1,254,840,830.00	(97,801,470.00)	92.76959844	Menguntungkan
3	Belanja Modal	25,360,122,550.00	24,515,837,026.42	(844,285,523.58)	96.6708145	Menguntungkan
B	PELAYANAN PUBLIK	378,147,477,016.28	363,314,523,051.75	(14,832,953,964.53)	96.07746848	Menguntungkan
1	Belanja Administrasi Umum	260,774,305,426.60	253,493,343,372.00	(7,280,962,054.60)	97.20794499	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	242,750,129,921.60	235,533,599,137.00	(7,216,530,784.60)	97.02717737	Menguntungkan
	Belanja Barang	16,814,259,680.00	16,750,218,450.00	(64,041,230.00)	99.61912549	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	10,820,000.00	10,649,700.00	(170,300.00)	98.42606285	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	1,199,093,825.00	1,198,876,085.00	(217,740.00)	99.98184129	Menguntungkan
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	29,377,080,485.00	27,970,759,051.75	(1,406,321,433.25)	95.21286183	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	6,327,045,075.00	5,956,654,076.86	(370,390,998.14)	94.14590865	Menguntungkan
	Belanja Barang	19,576,190,340.00	18,779,879,262.89	(796,311,077.11)	95.93224696	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	920,950,000.00	847,269,770.00	(73,680,230.00)	91.99954069	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	2,552,895,070.00	2,386,955,942.00	(165,939,128.00)	93.49996285	Menguntungkan
3	Belanja Modal	59,211,010,490.00	53,681,021,849.00	(5,529,988,641.00)	90.66054	Menguntungkan
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	25,682,385,600.00	25,334,147,459.00	(348,238,141.00)	98.64405844	Menguntungkan
5	Belanja Tak Tersangka	3,102,697,014.68	2,835,251,320.00	(267,445,694.68)	91.38021878	Menguntungkan
	Jumlah Belanja	521,742,186,416.79	480,259,487,282.01	(41,482,699,134.78)	92.0491959	Menguntungkan

	Surplus/Defisit	(72,771,325,405.79)	921,973,352.17	73,693,298,757.96		
III	PEMBIAYAAN					
1	Penerimaan Daerah	78,673,741,003.79	52,055,946,517.24	(26,617,794,486.55)	66.16686311	Tidak Menguntungkan
	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	50,373,741,003.79	50,401,982,367.24	28,241,363.45	100.0560637	Menguntungkan
	Penerimaan Pinjaman Obligasi	28,300,000,000.00	-	(28,300,000,000.00)	0	
	Pengembalian Penguatan Modal Dinas Perhutanan dan P2KPM	-	1,653,964,150.00	1,653,964,150.00		
2	Pengeluaran Daerah	5,902,415,598.00	52,977,919,869.41	47,075,504,271.41	897.5633618	Tidak Menguntungkan
	Sisa Perhitungan Tahun Berkenan	-	42,861,956,277.01	42,861,956,277.01		
	Penyertaan Modal	5,764,670,664.00	5,764,670,664.00	-	100	Efisien
	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	137,744,934.00	137,744,928.40	(5.60)	99.99999593	Menguntungkan
	Piutang PSS	-	3,660,898,000.00	3,660,898,000.00		
	Piutang Sekretariat	-	552,650,000.00	552,650,000.00		
	Jumlah Pembiayaan	72,771,325,405.79	(921,973,352.17)	(73,693,298,757.96)		

Tabel 5.3
 Analisis Varians
 RINGKASAN PERHITUNGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2005

No	URAIAN	JUMLAH		VARIANS	%	KESIMPULAN
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAPATAN					
A	Pendapatan Asli Daerah	66,511,681,403.00	77,904,742,688.20	11,393,061,285.20	117.129414	Menguntungkan
	Pajak Daerah	33,067,763,825.00	36,638,630,959.38	3,570,867,134.38	110.798635	Menguntungkan
	Retribusi Daerah	26,856,179,200.00	30,067,556,699.14	3,211,377,499.14	111.9576857	Menguntungkan
	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	3,319,207,228.00	4,028,081,206.99	708,873,978.99	121.3567256	Menguntungkan
	Lain-lain Pendapatan	3,268,531,150.00	7,170,473,822.69	3,901,942,672.69	219.3790878	Menguntungkan
B	Dana Perimbangan	395,849,000,000.00	417,413,902,174.84	21,564,902,174.84	105.4477597	Menguntungkan
	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	34,500,000,000.00	46,647,017,189.00	12,147,017,189.00	135.2087455	Menguntungkan
	Dana Alokasi Umum	318,139,000,000.00	318,139,000,000.00	-	100	Efektif
	Dana Alokasi Khusus	10,600,000,000.00	10,600,000,000.00	-	100	Efektif
	Dana Perimbangan dari Propinsi	32,610,000,000.00	42,027,884,985.84	9,417,884,985.84	128.8803587	Menguntungkan
C	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	22,230,230,000.00	25,230,230,000.00	3,000,000,000.00	113.495137	Menguntungkan
	Jumlah Pendapatan	484,590,911,403.00	520,548,874,863.04	35,957,963,460.04	107.4202719	Menguntungkan
II	BELANJA					
A	APARATUR DAERAH	135,404,824,253.00	101,886,834,178.67	(33,517,990,074.33)	75.24608871	Menguntungkan
1	Belanja Administrasi Umum	93,807,255,381.00	69,591,680,577.57	(24,215,574,803.43)	74.18581888	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	79,838,410,966.00	56,930,811,056.07	(22,907,599,909.93)	71.30754529	Menguntungkan
	Belanja Barang dan Jasa	11,162,230,455.00	10,219,740,154.50	(942,490,300.50)	91.55643396	Menguntungkan

	Belanja Perjalanan Dinas	1,009,364,500.00	704,513,580.00	(304,850,920.00)	69.79773709	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	1,797,249,460.00	1,736,615,787.00	(60,633,673.00)	96.62630735	Menguntungkan
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	34,008,605,772.00	27,031,237,601.10	(6,977,368,170.90)	79.48352185	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	12,284,832,760.00	10,288,141,000.00	(1,996,691,760.00)	83.74669156	Menguntungkan
	Belanja Barang dan Jasa	17,186,683,837.00	13,654,582,101.10	(3,532,101,735.90)	79.448614	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	2,822,937,600.00	1,811,562,570.00	(1,011,375,030.00)	64.17295834	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	1,714,151,575.00	1,276,951,930.00	(437,199,645.00)	74.49469164	Menguntungkan
3	Belanja Modal	7,588,963,100.00	5,263,916,000.00	(2,325,047,100.00)	69.36278291	Menguntungkan
B	PELAYANAN PUBLIK	438,184,953,638.00	406,392,709,579.50	(31,792,244,058.50)	92.74456053	Menguntungkan
1	Belanja Administrasi Umum	272,606,129,491.00	255,224,084,049.00	(17,382,045,442.00)	93.62375106	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	243,249,846,101.00	232,569,478,477.00	(10,680,367,624.00)	95.60930138	Menguntungkan
	Belanja Barang dan Jasa	27,698,525,890.00	21,006,737,131.00	(6,691,788,759.00)	75.84063215	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	65,550,000.00	64,059,310.00	(1,490,690.00)	97.72587338	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	1,592,207,500.00	1,583,809,131.00	(8,398,369.00)	99.47253301	Menguntungkan
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	42,256,140,263.00	39,277,079,163.00	(2,979,061,100.00)	92.9499924	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	9,428,125,938.00	9,105,810,955.00	(322,314,983.00)	96.58134623	Menguntungkan
	Belanja Barang dan Jasa	29,466,608,025.00	27,014,235,561.00	(2,452,372,464.00)	91.67745245	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	841,730,000.00	739,138,292.00	(102,591,708.00)	87.81180331	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	2,519,676,300.00	2,417,894,355.00	(101,781,945.00)	95.96051505	Menguntungkan
3	Belanja Modal	75,091,727,650.00	68,333,656,649.00	(6,758,071,001.00)	91.00024568	Menguntungkan
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	45,626,518,221.00	43,057,889,718.50	(2,568,628,502.50)	94.37031664	Menguntungkan
5	Belanja Tak Tersangka	2,604,438,013.00	500,000,000.00	(2,104,438,013.00)	19.19799963	Menguntungkan

	Jumlah Belanja	573,589,777,891.00	508,279,543,758.17	(65,310,234,132.83)	88.613773	Menguntungkan
	Surplus/Defisit	(88,998,866,488.00)	12,269,331,104.87	101,268,197,592.87		
III	PEMBIAYAAN					
1	Penerimaan Daerah	97,518,990,488.00	47,893,357,890.01	(49,625,632,597.99)	49.11182699	Tidak Menguntungkan
	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	45,430,633,090.01	45,430,633,090.01	-	100	Efektif
	Penerimaan Pinjaman	52,088,357,397.99	-	(52,088,357,397.99)	0	
	Penerimaan Piutang	-	2,462,724,800.00	2,462,724,800.00		
	Pengembalian Penguatan Modal	-	-	-		
2	Pengeluaran Daerah	8,520,129,000.00	60,162,688,994.88	51,642,559,994.88	706.124156	Tidak menguntungkan
	Sisa Perhitungan Tahun Berkenan	-	51,689,560,066.48	51,689,560,066.48		
	Penguatan Modal	4,900,000,000.00	4,853,000,000.00	(47,000,000.00)	99.04081633	Menguntungkan
	Penyertaan Modal	3,482,384,000.00	3,482,384,000.00	-	100	Efisien
	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	137,745,000.00	137,744,928.40	(71.60)	99.99994802	Menguntungkan
	Piutang PSS	-	-	-		
	Piutang Sekretariat	-	-	-		
	Jumlah Pembiayaan	88,998,861,488.00	(12,269,331,104.87)	(101,268,192,592.87)	-13.78594164	

Tabel 5.4
Analisis Varians
RINGKASAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

No	URAIAN	JUMLAH		VARIANS	%	KESIMPULAN
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAPATAN					
A	Pendapatan Asli Daerah	75,792,320,330.00	90,710,095,117.40	14,917,774,787.40	119.6824358	Menguntungkan
	Pajak Daerah	32,750,000,000.00	37,979,313,374.32	5,229,313,374.32	115.9673691	Menguntungkan
	Retribusi Daerah	33,405,992,000.00	34,867,831,814.83	1,461,839,814.83	104.3759809	Menguntungkan
	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	3,372,204,050.00	5,048,288,039.65	1,676,083,989.65	149.7029232	Menguntungkan
	Lain-lain Pendapatan	6,264,124,280.00	12,814,661,888.60	6,550,537,608.60	204.5722804	Menguntungkan
B	Dana Perimbangan	578,497,000,000.00	612,219,485,636.89	33,722,485,636.89	105.8293277	Menguntungkan
	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	35,500,000,000.00	49,511,371,448.00	14,011,371,448.00	139.468652	Menguntungkan
	Dana Alokasi Umum	485,397,000,000.00	485,397,000,000.00	-	100	Efektif
	Dana Alokasi Khusus	25,800,000,000.00	25,860,000,000.00	60,000,000.00	100.2325581	Menguntungkan
	Dana Perimbangan dari Propinsi	31,800,000,000.00	51,451,114,188.89	19,651,114,188.89	161.7959566	Menguntungkan
C	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-		
	Jumlah Pendapatan	654,289,320,330.00	702,929,580,754.29	48,640,260,424.29	107.43406	Menguntungkan
II	BELANJA					
A	APARATUR DAERAH	175,796,170,280.94	133,556,119,199.54	(42,240,051,081.40)	75.97214375	Menguntungkan
1	Belanja Administrasi Umum	123,121,944,380.94	92,567,442,185.68	(30,554,502,195.26)	75.18354478	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	102,242,121,632.00	73,470,442,335.00	(28,771,679,297.00)	71.8592701	Menguntungkan
	Belanja Barang dan Jasa	16,912,081,859.94	15,663,169,924.68	(1,248,911,935.26)	92.61526792	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	1,438,955,150.00	1,026,975,300.00	(411,979,850.00)	71.36951419	Menguntungkan

	Belanja Pemeliharaan	2,528,785,739.00	2,406,854,626.00	(121,931,113.00)	95.17827426	Menguntungkan
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	40,716,010,040.00	32,086,174,598.86	(8,629,835,441.14)	78.80481061	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	20,858,729,840.00	16,490,272,573.86	(4,368,457,266.14)	79.0569354	Menguntungkan
	Belanja Barang dan Jasa	16,909,709,150.00	13,300,196,583.00	(3,609,512,567.00)	78.65420076	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	2,941,271,050.00	2,289,405,442.00	(651,865,608.00)	77.83728201	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	6,300,000.00	6,300,000.00	-	100	Efisien
3	Belanja Modal	11,958,215,860.00	8,902,502,415.00	(3,055,713,445.00)	74.44674456	Menguntungkan
B	PELAYANAN PUBLIK	540,923,969,340.66	476,209,289,328.01	(64,714,680,012.65)	88.03627059	Menguntungkan
1	Belanja Administrasi Umum	336,036,187,034.66	308,806,280,668.00	(27,229,906,366.66)	91.89673392	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	289,427,923,796.00	266,482,603,412.00	(22,945,320,384.00)	92.07218154	Menguntungkan
	Belanja Barang dan Jasa	44,027,341,463.66	39,761,556,320.00	(4,265,785,143.66)	90.31105445	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	93,400,000.00	91,049,880.00	(2,350,120.00)	97.48381156	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	2,487,521,775.00	2,471,071,056.00	(16,450,719.00)	99.33867035	Menguntungkan
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	49,374,510,426.00	45,064,967,589.00	(4,309,542,837.00)	91.27172543	Menguntungkan
	Belanja Pegawai/Personalia	14,807,655,151.00	14,191,879,183.00	(615,775,968.00)	95.84150251	Menguntungkan
	Belanja Barang	30,281,271,075.00	26,886,798,508.00	(3,394,472,567.00)	88.79019128	Menguntungkan
	Belanja Perjalanan Dinas	1,354,525,500.00	1,080,311,978.00	(274,213,522.00)	79.75575048	Menguntungkan
	Belanja Pemeliharaan	2,931,058,700.00	2,905,977,920.00	(25,080,780.00)	99.14430987	Menguntungkan
3	Belanja Modal	101,155,896,680.00	71,520,070,883.01	(29,635,825,796.99)	70.70281934	Menguntungkan
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	50,357,375,200.00	47,069,552,806.00	(3,287,822,394.00)	93.47102111	Menguntungkan
5	Belanja Tak Tersangka	4,000,000,000.00	3,748,417,382.00	(251,582,618.00)	93.71043455	Menguntungkan
	Jumlah Belanja	716,720,139,621.60	609,765,408,527.55	(106,954,731,094.05)	85.07719747	Menguntungkan
	Surplus/Defisit	(62,430,819,291.60)	93,164,172,226.74	155,594,991,518.34		

III PEMBIAYAAN					
1 Penerimaan Daerah	71,768,564,217.00	51,691,306,850.48	(20,077,257,366.52)	72.02499787	dak Menguntungkan
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	51,689,560,066.48	51,691,306,850.48	1,746,784.00	100.0033794	Menguntungkan
Penerimaan Pinjaman	20,079,004,150.52	-	(20,079,004,150.52)	0	
2 Pengeluaran Daerah	9,337,744,925.40	9,337,744,925.40	-	100	Efisien
Penguatan Modal	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	100	Efisien
Penyertaan Modal	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	-	100	Efisien
Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	137,744,925.40	137,744,925.40	-	100	Efisien
Jumlah Pembiayaan neto:	62,430,819,291.60	42,353,561,925.08	(20,077,257,366.52)	67.84079146	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(0.00)	135,517,734,151.82	135,517,734,151.82		

Tabel 5.5
Analisis Varians
RINGKASAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

No	URAIAN	JUMLAH		VARIANS	%	KESIMPULAN
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Pendapatan Pajak Daerah	42,000,000,000.00	50,287,665,731.91	8,287,665,731.91	119.7325375	Menguntungkan
	Pendapatan Retribusi Daerah	39,299,207,160.00	40,965,628,030.57	1,666,420,870.57	104.2403422	Menguntungkan
	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Drh yg Dipisahkan	5,634,323,740.00	5,732,297,630.18	97,973,890.18	101.7388758	Menguntungkan
	Lain-lain PAD yang Sah	7,962,915,820.00	23,670,957,328.34	15,708,041,508.34	297.2649449	Menguntungkan
	Jumlah pendapatan Asli Daerah (PAD)	94,896,446,720.00	120,656,548,721.00	25,760,102,001.00	127.1454864	Menguntungkan
2	Pendanaan Transfer					
	Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan					
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	62,079,000,000.00	68,345,288,361.00	6,266,288,361.00	110.0940549	Menguntungkan
	Dana Alokasi Umum	543,065,000,000.00	543,065,000,000.00	-	100	Efektif
	Dana Alokasi Khusus	10,151,000,000.00	10,151,000,000.00	-	100	Efektif
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	-	100	Efektif
	Bantuan Keu. Dr Pem. Pusat utk Pendidikan	-	5,613,532,600.00	5,613,532,600.00	0	
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	623,295,000,000.00	635,174,820,961.00	11,879,820,961.00	101.9059708	Menguntungkan
	Transfer Pemerintah Provinsi					
	Dana Bagi Hasil Pajak dr Prov dan Pemda Lain	48,924,981,600.00	52,201,913,300.00	3,276,931,700.00	106.6978701	Menguntungkan
	Bantuan Keuangan dr Prov atau Pemda Lain	8,600,000,000.00	12,799,500,000.00	4,199,500,000.00	148.8313953	Menguntungkan
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	57,524,981,600.00	65,001,413,300.00	7,476,431,700.00	112.9968433	Menguntungkan
	Jumlah Pendapatan Transfer	680,819,981,600.00	700,176,234,261.00	19,356,252,661.00	102.8430794	Menguntungkan
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
	Pendapatan Hibah	-	2,062,081,450.00	2,062,081,450.00	0	
	Kompensasi Pajak Penghasilan	-	2,109,321,660.00	2,109,321,660.00	0	

	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	4,171,403,110.00	4,171,403,110.00	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	775,716,428,320.00	825,004,186,092.00	49,287,757,772.00	106.353837	Menguntungkan
B	BELANJA					
	1 Belanja Operasi					
	Belanja Pegawai/Personalia	533,823,068,952.22	468,668,466,025.00	(65,154,602,927.22)	87.7947195	Menguntungkan
	Belanja Barang	117,576,601,333.60	98,462,427,536.50	(19,114,173,797.10)	83.74321627	Menguntungkan
	Belanja Bunga	144,000,000.00	136,590,831.64	(7,409,168.36)	94.85474419	Menguntungkan
	Belanja Subsidi	7,750,204,585.00	7,743,887,439.00	(6,317,146.00)	99.91849059	Menguntungkan
	Belanja Bantuan Sosial	48,511,290,033.80	39,938,343,865.00	(8,572,946,168.80)	82.32793611	Menguntungkan
	Jumlah Belanja Operasi	707,805,164,904.62	614,949,715,697.14	(92,855,449,207.48)	86.88121339	Menguntungkan
	2 Belanja Modal					
	Belanja Tanah	28,551,406,400.00	12,219,081,813.00	(16,332,324,587.00)	42.7967773	Menguntungkan
	Belanja Peralatan dan Mesin	29,346,454,450.00	22,030,162,300.00	(7,316,292,150.00)	75.06924674	Menguntungkan
	Belanja Gedung dan Bangunan	60,326,995,979.00	50,763,440,056.86	(9,563,555,922.14)	84.14713717	Menguntungkan
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	27,558,190,883.00	23,012,501,691.00	(4,545,689,192.00)	83.50512481	Menguntungkan
	Belanja Aset Tetap Lainnya	7,450,725,150.00	1,535,008,240.12	(5,915,716,909.88)	20.60213213	Menguntungkan
	Jumlah Belanja Modal	153,233,772,862.00	109,560,194,100.98	(43,673,578,761.02)	71.49872515	Menguntungkan
	3 Belanja Tak Terduga					
	Belanja Tak Terduga	7,933,301,990.00	-	(7,933,301,990.00)	0	
	Jumlah Belanja Tak Terduga	7,933,301,990.00	-	(7,933,301,990.00)	0	
	JUMLAH BELANJA	868,972,239,756.62	724,509,909,798.12	(144,462,329,958.50)	83.3754954	Menguntungkan
C	TRANSFER					
	Transfer Bagi Hasil ke Desa					
	Belanja Bagi Hasil Kpd Pem Prov/Kab/Desa	18,803,945,253.20	18,615,842,894.24	(188,102,358.96)	98.99966546	Menguntungkan
	Belanja Bantuan Keu Kpd Pem Prov/Kab/Desa	9,062,420,000.00	8,988,223,200.00	(74,196,800.00)	99.18126946	Menguntungkan
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Transfer ke Desa	27,866,365,253.20	27,604,066,094.24	(262,299,158.96)	99.05872489	Menguntungkan
	JUMLAH TRANSFER	27,866,365,253.20	27,604,066,094.24	(262,299,158.96)	99.05872489	Menguntungkan
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	896,838,605,009.82	752,113,975,892.36	(144,724,629,117.46)	83.86280114	Menguntungkan
	SURPLUS / DEFISIT	(121,122,176,689.82)	72,890,210,199.64	194,012,386,889.46		

D	PEMBIAYAAN					
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
	Penggunaan SILPA	135,517,734,154.82	135,517,734,151.82	(3.00)	100	Efektif
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	1,750,823,200.00	1,750,823,200.00	0	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	135,517,734,154.82	137,268,557,351.82	1,750,823,197.00	101.2919514	Menguntungkan
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
	Penyertaan Modal (investasi) Pemda	9,750,000,000.00	9,750,000,000.00	-	100	Efisien
	Pembayaran Pokok Pinjaman ke Pem. Pusat	138,000,000.00	137,744,928.40	(255,071.60)	99.81516551	Menguntungkan
	Pemberiaan Pinjaman Daerah	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	-	100	Efisien
	Restitusi Pajak	7,557,465.00	7,557,465.00	-	100	Efisien
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14,395,557,465.00	14,395,302,393.40	(255,071.60)	99.99822812	Menguntungkan
	PEMBIAYAAN NETO	121,122,176,689.82	122,873,254,958.42	1,751,078,268.60	101.4457124	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	195,763,465,158.06	195,763,465,158.06		